

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



RENCANA KERJA (RENJA)
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 telah selesai disusun. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, sekaligus sebagai bahan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 merencanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan. Renja tersebut memuat sebanyak 10 program dan 24 kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut hasil sinkronisasi antara kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan pada Dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 serta mengakomodasi usulan masyarakat hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk kegiatan Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan tahun 2025 ini belum sempurna, sehingga kritik dan masukan dari berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dengan kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe Kepulauan sangat kami harapkan.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara

Pada tanggal, Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



SRMIN, S.Pd.,M.Pd

Pembina Tingkat I, IV/b

MP. 19740612 200502 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan tujuan	3
1.4 Sistematika penulisan	3
 BAB II EVALUASI KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	27
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	32
4.2 Rencana Tindak Lanjut	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021–2026 yang disusun pada tahun 2023 yang direview pada tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi **Visi** Bupati Konawe Kepulauan yaitu “*Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas*” serta **Misi Pertama** yaitu Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan pendidikan pada tahun 2024. Pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 difokuskan pada peningkatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau, peningkatan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara serta pengembangan dan pelestarian adat dan budaya serta tradisi.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan pendidikan, prioritas pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal jenjang Pendidikan Dasar;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rencana pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 - t. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau (Renja perubahan SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025, sekaligus menyajikan tujuan-tujuan strategis yang tidak tercapai pada akhir periode Renstra;
- b. Menyediakan Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan yang jelas dan terarah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025;
- c. Menyediakan media komunikasi antar para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan dengan Koordinator atau Pendidik Wilayah Kecamatan, Dewan Pendidikan maupun dengan satuan-satuan pendidikan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Hasil Rekapitulasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan TW II 2025

Dinas Pendidikan dan kebudayaan pada Belanja Operasi dan Belanja modal melaksanakan 10 Program dan 22 Kegiatan dengan anggaran total sebesar Rp 102.841.334.700. Realisasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan pada Belanja Langsung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar Rp26.021.839.739, atau mencapai 25,30% terhadap seluruh anggaran Rencana kerja.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1
Realisasi Belanja Operasi sampai Triwulan II

KODE					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Renstra OPD Tahun 2026 (Akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025 s/d Triwulan II					Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentsra s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian program dan Kegiatan Renja s/d Juni 2025		Tingkat Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
									K	Rp	K	Rp	%		
1					2	3	4	5	6		7		8= 7/6 *100	9= 5+7	10 = 9/4*100
					Program										
					Kegiatan										
					Sub kegiatan										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	6	2	21.041.000	1	8.881.000	42,20	7	58,33
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	6	3	1	8.881.000	1	8.881.000	100	4	66,66
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3	1	8.881.000	1	8.881.000	100	4	66,66
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	1	36.219.000	1	28.019.000	77,3599492	4	66,66
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2580	1290	12	54.871.315.285	430	23.584.186.139	42,9809018	1720	66,66
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18	9	1	10.000.000		-	0	9	50
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah peserta pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah			4	84.792.500	1	18.775.000	22,1422885	1	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	330	165		50.000.000		-	0	165	50
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				124.500.000		14.325.000	11,5060241	0	

1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	1	1	06												
1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga		0		33.120.000		3.120.000	9,42028986	0	
	1	1	06	03											
1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		0		87.777.280		12.000.000	13,6709636	0	
	1	1	06	04											
1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		0		81.797.500		12.000.000	14,670375	0	
	1	1	06	05											
1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0		5.280.000		960.000	18,1818182	0	
	1	1	06	06											
1	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		0		65.800.000		12.443.000	18,9103343	0	
	1	1	06	08											
1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216	108	35	506.342.000	8	46.415.100	9,16674896	116	53,70
	1	1	06	09											
1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediahnya Peralatan dan Mesin kantor									
	1	1	07												
1	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	6	3	5	100.277.000	0	-	0	3	50
	1	1	07	06											
1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	1	1	08												
1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		21.990.000		5.400.000	24,5566166	0	
	1	1	08	01											
1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0		6.891.205		-	0	0	
	1	1	08	02											
1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan kantor	18	9	12	142.800.000	3	27.000.000	18,907563	12	66,66
	1	1	08	04											
1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	1	1	09												

1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlakasnya jasa surat menyurat	120	60		186.350.000		42.978.400	23,063268	60	50
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	3	1	200.004.000	0	-	0	3	50
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	30	15	5	245.795.000	0	-	0	15	50
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	48	24	8	540.459.001	8	-	0	32	66,66
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	60	30	10	4.219.744.999	0	-	0	30	50
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	66	33	11	153.908.000	0	-	0	33	50
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	30	15	5	399.279.335	0	-	0	15	50
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	24	12	4	200.000.000	0	199.350.000	99,675	12	50
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	42	21	7	622.480.000	0	-	0	21	50

1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16	8	2	2.002.000.000	0	-	0	8	50
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	30	15	5	651.926.600	4	455.986.600	69,9444692	19	63,33
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan	1308	654	12	720.000.000	3	110.250.000	15,3125	657	50,22
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	150	50	740.665.800	0		0	150	50
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	300	150	50	1.302.185.620	0		0	150	50
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300	150	50	4.601.340.000	0		0	150	50
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dana BOS Sekolah Dasar yang Terkelola dengan Baik	300	150	50	593.182.640	0		0	150	50
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	50	556.442.080	0		0	0	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	60	30	3	491.590.000	0		0	30	50
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6	3	50	176.486.500	45	126.986.500	71,95	48	800
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	366	183	61	2.725.942.000	0		0	183	50

1	0	0	2.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
1	0	0	2.	00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12	6	2	1.101.000.000	0		0	6	50
1	0	0	2.	00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	48	24	8	657.000.000	0		0	24	50
1	0	0	2.	00	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	81	40,5	18	339.000.000	0		0	40,5	50
1	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		18	9	3	2.231.133.000	0		0	9	50
1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18	9	4	178.000.000	0		0	9	50
1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	3	1	1.269.560.000	0		0	3	50
1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30	15	5	399.279.335	0		0	15	50
1	0	0	2.	00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	24	12	4	200.000.000	0	199.200.000	99,6	12	50
1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan yang terlaksana	42	21	7	468.360.000	0		0	21	50

1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24	12	4	1.070.000.000	0		0	12	50
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	540	270	12	630.000.000	3	92.250.000	14,6428571	273	50,55
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	6	3	18	586.803.500	0		0	3	50
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	108	54	18	903.188.080	0	176.857.000	19,58	54	50
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	108	54	18	2.325.700.000	0		0	54	50
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	108	54	18	482.297.640	0		0	54	50
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	18	285.784.140	0		0	0	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6	3	1	249.735.000	1	249.735.000	100	4	66,66
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	52	26	10	520.000.000	0		0	26	50
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										

1	0 1	0 2	2. 03	00 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12	6	2	260.233.000	0		0	6	50
1	0 1	0 2	2. 03	00 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	12	6	2	614.991.000	0		0	6	50
1	0 1	0 2	2. 03	00 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6	3	1	402.571.500	1		0	4	66,66
1	0 1	0 2	2. 03	00 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	936	468	12	822.000.000	3	183.750.000	22,354014 6	471	50,32
1	0 1	0 2	2. 03	00 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	6	3	52	135.104.500	0		0	3	50
1	0 1	0 2	2. 03	00 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	312	156	52	522.295.500	0		0	156	50
1	0 1	0 2	2. 03	00 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	312	156	52	1.328.670.000	0		0	156	50
1	0 1	0 2	2. 03	00 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	6	3	52	186.633.500	0		0	3	50

1	0 1	0 2	2. 04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen									
1	0 1	0 2	2. 04	00 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP								0	
1	0 1	0 2	2. 04	00 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	6	3	1	208.614.500	0		0	3	50
1	0 1	0 2	2. 04	00 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	72	36	12	656.670.000	0		0	36	50
1	0 1	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										
1	0 1	0 3	2. 01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun									
1	0 1	0 3	2. 01	00 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	6	3	2	292.505.000	1	189.810.00 0	64,891198 4	4	66,66
1	0 1	0 3	2. 01	00 07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6	3	3	770.073.160	0		0	3	50

1	0 1	0 3	2. 02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun									
1	0 1	0 3	2. 02	00 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan AnaknUsia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	6	3	1	64.100.000	0		0	3	50
1	0 1	0 3	2. 02	00 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	6	3	1	190.005.000	1	189.900.000	99,944738 3	4	66,66
1	0 1	0 3	2. 02	00 06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		6	3		73.100.000			0	3	50
1	0 1	0 4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
1	0 1	0 4	2. 01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
1	0 1	0 4	2. 01	00 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan danPemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanm Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	600	300	1	366.452.000	0		0	300	50

1	0 1	0 4	2. 01	00 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6	3	1	94.812.500	0		0	3	50
1	0 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN										
1	0 1	0 5	2. 01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										
1	0 1	0 5	2. 01	00 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6	3	1	100.000.000	0		0	3	50
1	0 1	0 6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA										
1	0 1	0 6	2. 01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1	0 1	0 6	2. 01	00 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun			1	200.000.000	0		0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										

2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										
2	2	0	2.		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6	3	2	493.948.000	1	13.500.000	2,7330812 2	4	66,66
2	2	0	2.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6	3	1	2.329.900.00 0	0		0	3	50
2	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										
2	2	0	2.		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		6	3	11	585.163.200	0		0	3	50
2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)									
2	2	0	2.		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		6	3	1	200.000.000	0		0	3	50

2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										
2	2	0	2.		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan			3	331.618.000	0		0	0	
2	2	0	2.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										
2	2	0	2.	00	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terlindungi	6	3	1	117.547.300	0		0	3	50
							10594	5297	945	102.841.334.700	517	26.021.839.739	25,30	5784	54,60

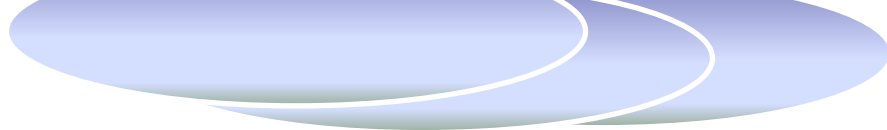
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai target kinerja yang dituangkan dalam indikator tujuan, sasaran dan program pada Renstra, Dinas Pendidikan perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai rencana dan tepat sasaran. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan menjadi salah satu pertimbangan perlu atau tidaknya menyusun Perubahan Renja. Rekapitulasi capaian kinerja perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Capaian Renstra OPD Tahun 2024		Catatan Analisis
					Target Kinerja Renstra	Realisasi Kinerja Capaian Renstra	



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya layanan Pendidikan Dasar yang bermutu dan berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		70	53,26	Belum dilaksanakan
			Presentase Lembaga PAUD dan PKBM yang terakreditasi Minimal B		50	29	Belum dilaksanakan
			Presentase SD/SMP yang terakreditasi Minimal B		50	19	Belum dilaksanakan
2	Meningkatnya kelestarian budaya asli Wawonii	Tersediahnya Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah	Cakupan Situs dan Cagar Budaya yang dikembangkan		3	11 (ditetapkan)	Belum dilaksanakan
			Cakupan Desa adat, museum, komunitas budaya dan kesenian tradisonal.		3	1	Belum dilaksanakan



Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2025 sampai dengan Triwulan II masih belum dapat di ukur, dikarenakan pengukuran Kinerja dilakukan setelah terealisasi semua program dan kegiatan yang telah di anggarkan. Jadi untuk sekarang ini capaian kinerja masih sama dengan yang telah tercapai di tahun 2024. Itu dikarenakan Tahun Anggaran Dinas Pendidikan tidak Sama dengan Tahun Ajaran Sekolah.

Analisa capaian indikator tujuan Dinas Pendidikan dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan anak usia dini tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) yakni umur 3-6 tahun, dengan metode perhitungan jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen %.

APK ini berfungsi untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan PAUD sekaligus sebagai indikator yang dapat menggambarkan adanya anak yang berusia lebih dari usia yang seharusnya pada suatu jenjang pendidikan tertentu dikarenakan harus mengulang kelas atau tidak lulus sekolah atau terlalu dini mengikuti sekolah. Rekap data APK PAUD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun Tahun 2024-Triwulan II ialah 53,26% nilai ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan yakni 70%.

Tidak dicapainya target APK PAUD dipengaruhi beberapa factor, Jika melihat jumlah desa di konawe kepulauan yang mencapai 96 desa dan keluhan maka pendirian lembaga PAUD pada idealnya harus 1 PAUD 1 Desa, yang berarti idealnya jumlah PAUD 96. Tetapi jumlah PAUD hanya terdiri dari 60 PAUD mengalami penambahan dari tahun lalu. Grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya stenga jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang berminat mengenyam pendidikan PAUD di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Presentase Lembaga PAUD dan PKBM yang terakreditasi Minimal B

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Usaha pemerintah untuk mengembangkan SDM melalui satuan pendidikan PAUD telah mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD.

Untuk sekolah jenjang PAUD dan PKBM yang bertugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal sudah mencapai jumlah 72 lembaga, diantaranya 60 lembaga PAUD dan 12 lembaga PKBM. Dari jumlah tersebut lembaga PAUD dan PKBM yang terakreditasi B masih berada diangka 30,55% angka ini mengalami peningkatan dari tahun lalu, sedangkan sisanya terakreditasi C 55,55% dan tahap pemetaan mutu 13,88%.

Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan menyiapkan satuan pendidikan

untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Akreditasi PAUD dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan atas dasar peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi beserta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal.

3. Presentase SD/SMP yang terakreditasi Minimal B

Akreditasi Sekolah di Kabupaten Konawe Kepulauan suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi sekolah bertujuan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki 18 SMP dan 50 SD, sehingga total keseluruhan adalah 68 sekolah. Dari jumlah tersebut hanya 19,11% sekolah yang mengantongi akreditasi B atau 12 sekolah, sisanya yang 79,41% atau 52 sekolah sudah berakreditasi C dan masih 1 sekolah yang belum terakreditasi.

Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak mengingat dinamika pendidikan telah banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance based) atau dari rules to principles. Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continuous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian Sekolah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif.

4. Jumlah Situs dan Cagar Budaya yang dikembangkan

Berdasarkan amanat UU 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Salah satu yang menjadi kekurangan pada pengembangan kebudayaan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah potensi penetapan dan pelestarian cagar budaya daerah.

Dengan ditetapkan cagar budaya di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Perkembangan dan kemajuan urusan bidang kebudayaan merupakan satu indikator kinerja bupati Konawe Kepulauan. Ditinjau dari aspek sosial kemasyarakatan, sikap egaliter suku wawonii sangat egaliter dan terbuka terhadap suku lain. Hal ini terbukti bahwa di Pulau Wawonii (*Kabupaten Konawe Kepulauan*) terdapat banyak suku-suku lain yang hidup menetap dan berdampingan dengan masyarakat lokal. Pembangunan kebudayaan menghadapi berbagai permasalahan, pada tahun 2023 telah ditetapkan 11 situs dan cagar budaya yang sebarannya terpisah-pisah, penetapan ini melebihi target tahun 2023 sebanyak 3 situs, hal ini terjadi karena pada tahun 2022 proses penetapan, namun dalam prosesnya sedikit mengalami penundaan, yang akhirnya ditetapkan pada tahun 2023.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara umum cukup baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan pendidikan dan capaian kinerja keuangan. Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
4. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;
5. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
6. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
7. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai institusi pelayanan publik bidang pendidikan, beberapa hal yang menjadi tantangan sekaligus peluang pada upaya peningkatan layanan pendidikan adalah : . .

1. Perubahan kebijakan penerapan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka.
2. Nilai-nilai luhur dijadikan momentum untuk peserta didik.
3. Keberagaman kekayaan budaya.
4. Peningkatan kualitas SDM pelaku budaya.

Beberapa permasalahan tersebut menjadi catatan penting dalam rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2025.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 berdasarkan Renja adalah 10 program dan 24 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 103.869.748.047,-. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sesuai yang terlampir pada Tabel 3.1.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam urusan pendidikan dan kebudayaan seperti yang tertuang dalam Restra 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta menjadi acuan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah di tahun 2025.

Pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 akan dihadapkan pada beberapa tantangan kondisi cuaca dan bencana seperti banjir dan jalan rusak yang menghambat proses distribusi barang maupun material-material pembangunan sekolah, penerapan kurikulum merdeka yang juga menuntut semua dimensi pendidikan untuk terus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi, infasi, penyelenggaraan pemilu tahun 2025. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan komitmen semua elemen dinas pendidikan baik, pimpinan, pengawas, kepala sekolah dan juga staf.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Upaya mewujudkan Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi Kabupaten berkembang di Sulawesi Tenggara wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan pendidikan, maka Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2025 disusun secara baik dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengalami proses perubahan dalam beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mencapai sebagaimana yang diharapkan

Angara, Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



ARMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740612 200502 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Poros Langara – Lampeopi Km 3 Kode Pos 93393 e-mail : konkepdikbud@gmail.com



RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025

KODE REKENING		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA
1	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp 103,869,748,047				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rp 99,883,158,200				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 57,503,963,970				
1	01	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 75,022,000				
1	01	01	2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 21,041,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 8,881,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8,881,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 36,219,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 55,381,315,285				
1	01	01	2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 55,371,315,285	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550 Orang/bulan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 10,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 84,792,500				
1	01	01	2.03.0004 Bimbingan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 84,792,500	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 174,500,000				
1	01	01	2.05.0002 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp 50,000,000	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 124,500,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,280,091,280				
1	01	01	2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 533,094,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 87,777,280	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 81,797,500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5,280,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 65,800,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 506,342,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 97,514,700				
1	01	01	2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 97,514,700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 173,481,205				
1	01	01	2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 21,990,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 6,891,205	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 144,600,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 237,247,000				
1	01	01	2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 186,350,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	01	2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 50,897,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 40,228,146,570				
1	01	02	2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 21,044,415,375				
1	01	02	2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp 100,000,000	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	6 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 145,795,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 540,459,001	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 100,000,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 4,113,744,999	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 100,000,000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 100,000,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 100,000,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 153,908,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 399,279,335	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 200,000,000	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 322,480,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp 2,002,000,000	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0025 Bimbingan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 651,926,600	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	100 Peserta Didik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 720,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 740,665,800	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0028 Bimbingan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 1,302,185,620	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Bimbingan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 4,601,340,000	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1	01	02	2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 593,182,640	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Rp 100,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Rp 100,000,000	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp 100,000,000	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Konten Digital	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 100,000,000	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 556,442,080	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 200,000,000	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 100,000,000	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Komunitas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0042 Penyediaan Infrastruktur TIK	Rp 192,577,800	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 125,000,000	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Rp 100,000,000	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp 200,000,000	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 200,000,000	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp 176,486,500	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 1,600,942,000	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 200,000,000	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 13,795,947,695				
1	01	02	2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 500,101,000	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 657,000,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 100,000,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Rp 339,000,000	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	150,000,000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	1,000,000,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp	231,133,000	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp	150,000,000	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp	100,000,000	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp	178,000,000	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ruang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp	150,000,000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	1,000,000,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp	399,279,335	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp	200,000,000	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	468,360,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp	870,000,000	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0038	Bimbingan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp	269,566,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Peserta Didik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0039	Penyerahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	630,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	586,803,500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0041	Bimbingan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	903,188,080	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp	2,325,700,000	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp	482,297,640	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp	200,000,000	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Konten Digital	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp	150,000,000	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp	285,784,140	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	200,000,000	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	100,000,000	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Komunitas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan, perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp	100,000,000	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Rp	100,000,000	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0057	Penyediaan Infrastruktur TIK	Rp	200,000,000	Tersedianya infrastruktur TIK	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp	149,735,000	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	320,000,000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp	100,000,000	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp	100,000,000	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp	100,000,000	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	4,522,499,000				
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp	160,233,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp	100,000,000	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Rp	150,000,000	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp	200,000,000	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp	114,991,000	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp	402,571,500	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Peserta Didik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0015	Penyerahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp	822,000,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, PAUD	Rp	235,104,500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0017	Bimbingan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp	322,295,500	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	1,328,670,000	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	186,633,500	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp	150,000,000	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp	50,000,000	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	50,000,000	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76 Komunitas	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp	100,000,000	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Ruang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0034	Bimbingan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp	50,000,000	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Peserta didik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp	100,000,000	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	865,284,500				
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / kesetaraan	Rp	100,000,000	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, Nonformal/Kesetaraan	Rp	108,614,500	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp	656,670,000	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Satuan Pendidikan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
1	01	03	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp	1,389,783,160				
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	912,578,160				
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	50,000,000	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	292,505,000	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	150,000,000	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Rp	150,000,000	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	270,073,160	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	477,205,000				
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	64,100,000	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	190,005,000	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	150,000,000	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	73,100,000	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	461,264,500				
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	461,264,500				
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	366,452,000	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	01	04	2.01	0002	Penerapan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	94,812,500	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp	100,000,000					
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	100,000,000					
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp	50,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rp	200,000,000					
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	200,000,000					
1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Rp	50,000,000	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kamus	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Rp	100,000,000	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Buku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	50,000,000	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp	3,986,589,847					
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	1,138,420,660					
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1,138,420,660					
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp	1,138,420,660	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-					
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-					
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		-	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	1,790,164,346					
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1,790,164,346					
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp	1,790,164,346	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp	240,966,400					
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	240,966,400					
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Rp	240,966,400	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	817,038,441					
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp	817,038,441					
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp	817,038,441	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya		-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp	-					
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya		-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan



ARMIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740612 200502 1 008



Wawonii
Bangkit

Lingkaran
Hati Emas

DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KESEHATAN
2025**



dinkeskonkep22@gmail.com



@dinkeskonkep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari setiap bidang yang ada, dan memperhatikan usulan dari Masyarakat, serta PAGU Indikatif dan Program Kegiatan Prioritas T.A. 2025. Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Renja Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana tahunan yang belum final sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu periode tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025, Visi dan Misi Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Diharapkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan ini dapat digunakan sebagai informasi dan acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) yang belum final dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

Langara, 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN -
KAB. KONAWE KEPULAUAN,**



BISMAN ABDULLAH, SKM., M. AP

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19801118 200502 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
II. EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD Tahun Lalu	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3. Isue-isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / SE Bupati	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
III. TUJUAN DAN SASARAN	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	30
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	31
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
V. PENUTUP	40
5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran	40
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	41
5.3. Rencana Tindak Lanjut	41

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaa Renja dan Pencapaian - Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	9
	2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Konawe - Kepulauan	17
	2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinkes - Kab. Konawe Kepulauan sejak Tahun 2022	18
	2.3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap - Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	20
	2.3.3. Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan - berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan R.I	21
	2.3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Kab. Konkep Berdasarkan RTRW- dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong - Keberhasilan Penanganannya	22
	2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / SE Bupati Konkep - Tahun 2025 Dinkes Kab. Konawe Kepulauan (Bagian 1)	25
	2.4.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / SE Bupati Konkep - Tahun 2025 Dinkes Kab. Konawe Kepulauan (Bagian 2)	26
	3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan	28
	3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025	30
	4.1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Renja SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah yang memuat kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah, disamping itu Renja SKPD juga merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD juga memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja.

Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya sebagai dokumen perencanaan yang kemudian dipadukan dengan hasil penjaringan aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan tingkat Kecamatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra, akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah (Bupati) melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Karena itu Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan kesehatan menetapkan Visi Dinas Kesehatan 2021-2026 yang mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yakni sebagai berikut :

***“ Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh)
dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026 ”***

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan memuat rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif setiap program dan kegiatan yang direncanakan, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan (KUA-PPAS) dan RAPBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2025, sebagai wujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan kedalam Program/Kegiatan tahunan;
- b. Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD;
- c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Program/Kegiatan tahunan bagi OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuannya adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja mulai dari pengertian Renja, proses penyusunan dan keterkaitan Renja dengan RKPD, Renstra OPD, Renja Dinkes Provinsi Sultra, Renstra Kemenkes RI dan dokumen lain; landasan hukum; dan maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan Program/Kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi; dan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dibiayai pada Tahun Anggaran 2025.

BAB V PENUTUP

Sedangkan pada BAB V merupakan bagian penutup yang memuat tentang catatan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.1.1**.

Dari uraian tabel 2.1.1 tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Untuk urusan wajib pelayanan dasar kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan mengelola 3 program yang terdiri atas 7 kegiatan dan 45 sub kegiatan, ternyata sebanyak 2 Program, 6 Kegiatan dan 44 sub kegiatan yang masih berada dibawah dari target yang ditetapkan (<).

Faktor-faktor penyebab belum tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sampai dengan tahun 2023 adalah :

1. Karena target dari Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) tersebut direncanakan akan terpenuhi atau tercapai pada akhir atau tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kab. Konawe Kepulauan.
2. Adanya fluktuasi besaran anggaran atau penetapan besaran Pagu Anggaran APBD untuk Dinas Kesehatan tidak sama setiap tahunnya, sehingga jika anggaran kecil maka konsekwensinya adalah tidak semua kegiatan yang telah direncanakan mendapatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan pada tahun tersebut.
3. Anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar kesehatan hanya berharap dari dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan setiap tahunnya, walaupun Pagu APBD kecil setiap tahunnya, program, kegiatan dan sub kegiatan ini tetap mendapatkan prioritas pembiayaan DAK dari Kementerian Kesehatan.

Dari capaian-capaian tersebut menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan, yaitu sebagian besar dari program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra yang direncanakan belum mencapai target, yang dikhawatirkan pada akhir atau tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan tidak akan tercapai.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

1. Dengan berupaya semaksimal mungkin mencari penganggaran yang sebesar-besarnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.
2. Mengutamakan pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas yang dapat mendorong pencapaian target program pada akhir tahun pelaksanaan Renstra.

TABEL 2.1.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
									Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(5+7+9)	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	=
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	100	12 Dok.	12 Dok.	100	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordin. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap.	3 Lap.	4 Lap.	3 Lap.	75	4 Lap.	4 Lap.	100	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	3 Lap.	100	3 Lap.	3 Lap.	100	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	290 OB	230 OB	290 OB	230 OB	79,310345	270 OB	270 OB	100	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Lap.Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100	1 Lap.	1 Lap.	100	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap. Hasil Binwas dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100	1 Lap.	1 Lap.	100	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
									Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(4+100)	12
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100	1 Lap.	1 Lap.	100	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100	90 Unit	90 Set	100	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	262 Paket	200 Paket	262 Paket	131	210 Paket	210 Paket	100	
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18 Dok.	18 Dok.	18 Dok.	18 Dok.	100	18 Dok.	18 Dok.	100	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yg Disediakan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	22 Paket	100	22 Paket	22 Paket	100	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	6 Paket	5 Paket	83,333333	6 Paket	6 Paket	100	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100	13 Paket	13 Paket	100	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	25 Paket	100	25 Paket	25 Paket	100	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100	13 Paket	13 Paket	100	
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100	12 Lap.	12 Lap.	100	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Lap.	90 Lap.	90 Lap.	90 Lap.	100	90 Lap.	90 Lap.	100	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(4+100)	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit SarPras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100	12 Lap.	12 Lap.	100	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	8 Lap.	12 Lap.	8 Lap.	66,6667	12 Lap.	12 Lap.	100	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap.	0 Lap.	12 Lap.	0 Lap.	0	12 Lap.	12 Lap.	100	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	100	12 Lap.	12 Lap.	100	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	147 Unit	137 Unit	137 Unit	137 Unit	100	137 Unit	137 Unit	100	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	< 102 per 100.000 KH	313 per 100.000 KH	112 per 100.0 00 KH	467 per 100.0 00 KH	23,89722	107 per 100.00 0 KH	107 per 100.00 0 KH	100	<
						Angka Kematian Bayi	< 10 1000 KH	8 1000 KH	13 1000 KH	11 1000 KH	120,1835	12 1000 KH	12 1000 KH	100	>
						Angka Kesakitan	< 101 per 100.000 pddk	180 per 100.000 pddk	136 per 100.0 00 pddk	139 per 100.0 00 pddk	97,55747	118 per 100.00 0 pddk	118 per 100.00 0 pddk	100	<
						Prevalensi Stunting	< 15 %	32 %	18 %	31 %	57,23473	16 %	16 %	100	<

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
1					2	3	4	5	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(4+100)	12
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	#DIV/0!	2 Paket	2 Paket	100	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah SarPras dan Alkes yg Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah SarPras Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit	1 Unit	3 Unit	300	6 Unit	6 Unit	100	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasyankes yang Disediakan	26 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	2 Paket	100	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100	50 Paket	50 Paket	100	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang	554 Orang	502 Orang	477 Orang	95,01992	502 Orang	502 Orang	100	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang	614 Orang	502 Orang	469 Orang	93,426295	502 Orang	502 Orang	100	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	760 Orang	529 Orang	450 Orang	448 Orang	99,555556	450 Orang	450 Orang	100	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3391 Orang	3203 Orang	2810 Orang	2685 Orang	95,551601	2810 Orang	2810 Orang	100	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
									Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(4+100)	12
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6123 Orang	5092 Orang	7138 Orang	6508 Orang	91,173998	7138 Orang	7138 Orang	100	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21023 Orang	2878 Orang	23313 Orang	16581 Orang	71,123408	23313 Orang	23313 Orang	100	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3829 Orang	2770 Orang	2827 Orang	2640 Orang	93,385214	2827 Orang	2827 Orang	100	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7989 Orang	985 Orang	2820 Orang	2398 Orang	85,035461	2820 Orang	2820 Orang	100	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	523 Orang	873 Orang	781 Orang	89,461627	873 Orang	873 Orang	100	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	43 Orang	48 Orang	47 Orang	97,916667	48 Orang	48 Orang	100	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	648 Orang	241 Orang	648 Orang	603 Orang	93,055556	648 Orang	648 Orang	100	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	780 Orang	692 Orang	640 Orang	630 Orang	98,4375	640 Orang	640 Orang	100	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dok. Hasil Pengelolaan Pelayanan Kes. bagi Penduduk Terdampak Krisis Kes. Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	9 Dok.	0 Dok.	9 Dok.	0 Dok.	0	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kestrad, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9 Dok.	0 Dok.	9 Dok.	0 Dok.	0	9 Dok.	9 Dok.	100	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4x100	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dok.	3 Dok.	9 Dok.	3 Dok.	33,333333	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100	1 Dok.	1 Dok.	100	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	100	7 Dok.	7 Dok.	100	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kes. Penyakit Menular & Tidak Menular	5 Dok.	3 Dok.	5 Dok.	3 Dok.	60	5 Dok.	5 Dok.	100	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dok.	19 Dok.	20 Dok.	19 Dok.	95	20 Dok.	20 Dok.	100	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	12 Spesimen	0 Spesimen	12 Spesimen	0 Spesi- men	0	12 Spesimen	12 Spesimen	100	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	100	5 Dok.	5 Dok.	100	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Faskes di Kab./Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yg Terakreditasi di Kab./Kota	9 Faskes	7 Faskes	9 Faskes	7 Faskes	77,777778	9 Faskes	9 Faskes	100	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	9 Lap.	0 Lap.	9 Lap.	0 Lap.	0	9 Lap.	9 Lap.	100	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100	1 Dok.	1 Dok.	100	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	#DIV/0!	0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Faskes yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kes.	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	37,5 %	44 %	33,3 %	75,68182	67 %	67 %	100	>
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab./Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dok hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kes.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	100	2 Dok.	2 Dok.	100	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehata	9 Dok.	0 Dok.	9 Dok.	0 Dok.	0	9 Dok.	9 Dok.	100	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	203 Orang	69 Orang	94 Orang	69 Orang	73,404255	94 Orang	94 Orang	100	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase fasyankes yang memiliki alat kesehatan, sedian farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	81,6 %	100 %	40,8 %	50 %	122,549	54,4 %	54,4 %	100	>
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko AlKes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko AlKes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 %	35 %	45 %	45 %	100	55 %	55 %	100	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dok hasil Wasdal serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	27 Dok.	18 Dok.	27 Dok.	18 Dok.	66,666667	27 Dok.	27 Dok.	100	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog dan Keluaran Keg s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun Berjalan (2024)		Catatan
									Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/(4+100)	12
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Wasdal serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk MakMin tertentu yg Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27 Dok.	18 Dok.	27 Dok.	18 Dok.	66,666667	27 Dok.	27 Dok.	100	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan UKBM aktif	80,5 %	32,29 %	53,8 %	62,7 %	116,5428	62,7 %	62,7 %	100	<
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tkt Daerah Kab./Kota	85 %	45 %	55 %	55 %	100	65 %	65 %	100	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dok. hasil Penyelenggaraan PromKes & Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36 Dok.	27 Dok.	36 Dok.	27 Dok.	75	36 Dok.	36 Dok.	100	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab./Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tkt Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil BimTek dan Supervisi UKBM	27 Dok.	18 Dok.	27 Dok.	18 Dok.	66,666667	27 Dok.	27 Dok.	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.2.1** berikut ini :

Tabel 2.2.1
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan

INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKU	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	√	√	121,2	116,4	111,6	106,8	313	467	106,8	102	Masih mempunyai utang target kinerja sebesar 355,4 per 100.000 KH
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	√	√	16,2	14,6	13,1	11,5	7,8	10,9	11,5	10	Melampaui target kinerja sebesar 2,2 per 1000 KH
Angka Kesakitan TB (per 100.000 Pddk)	√	√	170,6	153,2	135,8	118,4	179,7	139,2	118,4	101	Masih mempunyai utang target kinerja sebesar 3,4 per 100.000 Pddk
Prevalensi Stunting pada Balita (%)	√	√	20,6	19,2	17,8	16,4	32,3	31,1	16,4	15	Masih mempunyai utang target kinerja sebesar 13,3 %
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	√	√	11	22	44	67	37,5	33,3	67	89	Masih mempunyai utang target kinerja sebesar 10,67%
Presentase fasyankes yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	√	√	13,6	27,2	40,8	27,2	40,8	50	54,4	68	Melampaui target kinerja sebesar 10,8%
Cakupan UKBM Aktif (%)	√	√	36	44,9	53,8	62,7	32,29	68,41	62,7	71,6	Melampaui target kinerja sebesar 14,61%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Secara umum, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan indikator kinerja urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Sejak Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Masalah	Faktor kunci keberhasilan
1.	AHH	- Layanan kesehatan rendah - Asupan gizi rendah akibat kemiskinan	Penyediaan dokter dan tenaga kesehatan/gizi
2.	BGB	- Posyandu belum merata - Kesadaran masyarakat masih rendah	- Penyediaan tenaga medis dan mengaktifkan posyandu - Program makanan tambahan bagi balita
3.	AKB	Tidak ada masalah	-
4.	Cakupan Imunisasi Campak	- Posyandu belum merata - Kesadaran masyarakat masih rendah - Wilayah terisolir - Jumlah TKT masih terbatas	Penyediaan tenaga medis dan mengaktifkan posyandu
5.	AKI	- Jumlah dokter dan TKT masih terbatas - Kesadaran masyarakat rendah - Masyarakat masih mengandalkan dukun - Kerapatan melahirkan tinggi	- Penyediaan dokter dan TKT, - Peningkatan cakupan layanan akseptor KB - Membangun kesadaran masyarakat
6.	PKD-TKT	- Masyarakat masih mengandalkan dukun - Kerapatan melahirkan tinggi	- Penyediaan dokter dan TKT, - Peningkatan cakupan layanan akseptor KB - Membangun kesadaran masyarakat

Keterangan: AHH = Angka Harapan Hidup (tahun), BGB = balita gizi buruk (%), AKB = Angka Kematian Bayi (per 1000 KH), CIC = Cakupan Imunisasi Campak (%), AKI = Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH), PKD-TKT = Proporsi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%).

Jika dijabarkan lebih lanjut dari identifikasi masalah kesehatan pada tabel diatas, maka Permasalahan-permasalahan urusan Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya jumlah bayi yang diimunisasi. Pemberian imunisasi adalah penting untuk mengurangi kematian balita. Untuk mengukur aspek ini dapat dilihat dari indikator cakupan IC. Cakupan IC adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima paling sedikit satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun. Kondisi CIC di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 70,50 persen. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan kriteria MDGs yakni 100 persen. Rendahnya cakupan IC disebabkan oleh keberadaan posyandu yang belum merata, dan kesadaran masyarakat masih rendah.

- b. Belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat dari indikator PKD-TKT yakni perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Perolehan dari indikator PKD-TKT di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 72,01 persen. Pencapaian tersebut masih lebih rendah dari kriteria yang dipersyaratkan oleh MDGs yakni 90 persen. Penyebabnya adalah jumlah dokter dan TKT yang masih terbatas, kesadaran masyarakat rendah dan masyarakat masih mengandalkan dukun.
- c. Fasilitas sanitasi yang relatif masih baik karena belum memenuhi syarat kesehatan. Sanitasi yang layak yakni sanitasi yang dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Indikator untuk menunjukkan hal ini adalah Akses Sanitasi Dasar (ASD) yakni proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan jumlah penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam presentase. Nilai yang diperoleh Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 93,81 persen diatas standar MDGs sebesar 62,41 persen.
- d. Masih tingginya wanita yang meninggal terkait dengan gangguan kehamilan selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Indikator untuk menunjukkan hal tersebut yakni Angka Kematian Ibu (AKI). Nilai yang diperoleh di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 427,35 (per 100.000 KH); jauh lebih besar dari kriteria yang dipersyaratkan dalam SDGs yakni 70 (per 100.000 KH).
- e. Masih tingginya presentase balita gizi kurang, pendek dan kurus. Indikator untuk menunjukkan hal tersebut yakni Prevalensi Stunting. Nilai Prevalensi Stunting yang diperoleh di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 29,5 persen; lebih besar dari kriteria yang dipersyaratkan dalam RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yakni 14 persen.
- f. Masih tingginya jumlah penderita penyakit *tuberculosis* (TB). Indikator untuk menunjukkan hal tersebut yakni *case notification rate* (CNR) seluruh kasus TB. Nilai CNR yang diperoleh di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah 139,2 per 100.000 penduduk; lebih besar dari kriteria yang dipersyaratkan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yakni 101 per 100.000 penduduk.
- g. Rendahnya rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Untuk menunjukkan hal tersebut dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Di Kabupaten Konawe Kepulauan nilai AHH pada tahun 2023 adalah 68,52 tahun. Pencapaian tersebut masih dibawah perolehan AHH Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 71,47 tahun.

Hasil telaahan terhadap beberapa permasalahan dibidang kesehatan maka beberapa faktor penghambat dan pendorong bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) Dalam Lingkaran Hati Emas Tahun 2026

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Wawonii			
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingginya angka kematian ibu (AKI), prevalensi stunting, dan angka kesakitan TB	Tata kelola upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di puskesmas belum optimal	Adanya dukungan masyarakat dalam implementasi program kesehatan
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Hampir semua puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar	Tata kelola sumberdaya manusia kesehatan di puskesmas perlu dioptimalkan	Komitmen pemerintah daerah untuk melakukan distribusi 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Ketersediaan dan tata kelola alat Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas/pustu perlu ditingkatkan	Tata kelola alat Kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan di pusk. /pustu perlu optimalkan	Anggaran untuk pelayanan kesehatan cukup tinggi
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesadaran masyarakat terkait Pencegahan penyakit perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) perlu ditingatkan	Tata Kelola pemberdayaan masyarakat belum optimal dan tingkat pengetahuan masvarakat kurang	Anggaran untuk pelayanan kesehatan cukup tinggi

Dari hasil penelaahan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dapat diketahui beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.3
Permasalahan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan
Renstra Kementerian Kesehatan R.I

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Renstra Kementerian Kesehatan R.I	1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan 2. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu 3. Pedoman/juknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat 4. Kebijakan yang berubah ditengah pelaksanaan kegiatan 5. SDM Tenaga Kesehatan di daerah yang kurang	1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan daerah 2. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu 3. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan e-renggar 4. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes terkadang belum mengakomodir kebutuhan di daerah 5. Kebijakan Moratorium rekrutmen CPNS	1. Anggaran kesehatan dari APBD yang terbatas 2. Ada anggaran dari Pusat untuk daerah 3. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi public mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka telaahan terkait permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kab. Konkep Berdasarkan RTRW dan KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS dan RTRW dengan Tupoksi Dinas	Permasalahan	Sebagai Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Pemenuhan sarana prasarana untuk pembangunan gedung pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Adanya gedung pelayanan kesehatan dasar yang belum sesuai standar	Belum adanya juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan	Adanya kebijakan pusat terkait pembangunan berwawasan lingkungan
2.	Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada kawasan resiko bencana misal banjir, kebakaran	Kurangnya inovasi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan resiko bencana	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dukungan dan kerjasama lintas sektor dan lintas program berjalan dengan baik
3.	Peningkatan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tidak semua sarana pelayanan kesehatan mempunyai sarana pembuangan air limbah	Kurangnya kompetensi sumber daya tenaga	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan
4.	Peningkatan sarana air bersih dan jamban keluarga	Masih adanya perilaku masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tersedianya dukungan Anggaran
5.	Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan iklim/cuaca	Masih adanya kasus penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan iklim/cuaca misal : Diare, DBD, ISPA dll	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan

Maka hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang ada saat ini. Maka Berdasarkan uraian dan analisis terhadap materi dan substansi KLHS RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, khususnya terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis, baik dalam skala daerah, nasional maupun skala internasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka isu-isu strategis pembangunan Kesehatan di Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kesehatan merupakan aspek pelayanan dasar dan menjadi indikator utama untuk menilai maju mundurnya suatu daerah. Dalam skala internasional maupun nasional, Kesehatan sudah lazim digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan suatu negara, diantaranya adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Millenium Development Goal's* (MDG's) atau *Sustainable Development Goals* (SDG). Karena itu, isu pada urusan Kesehatan ini antara lain akan diarahkan untuk menaikkan posisi IPM Kabupaten Konawe Kepulauan dari peringkat 12 dari 17 kabupaten/kota tahun 2023 menjadi peringkat 10 besar di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025.
2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan persentase KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak (93,81% tahun 2023), dan persentase KK Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) (90,2% tahun 2023).
3. Sedangkan upaya kesehatan perorangan yakni pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui peningkatan kasus penanganan wabah penyakit menular, pengembangan sumber daya kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan melalui penyediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan berdasarkan kebutuhan, Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan Dasar, perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan penanganan kasus prevalensi bayi gizi kurang, keselamatan ibu melahirkan dan anak Keluarga Berencana melalui menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita, meningkatnya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization), persentase cakupan kunjungan Ibu hamil K4 dan Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan, serta pengadaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Sampai saat Renja ini dibuat, sudah ada rancangan RKPD tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kab. Konawe Kepulauan sebagaimana terlihat pada matriks berikut :

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA OPERASI (Rp)
1	2	3
URUSAN : WAJIB PELAYANAN DASAR		
KESEHATAN		
DINAS KESEHATAN	Rp. 25.127.258.411,-	Rp. 56.983.970.957,-
Arah Kebijakan Sesuai RPJMD		
Memantapkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui interkoneksi sistem pelayanan Kesehatan		
Program Prioritas 2025 :		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan		

RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, maka kemudian dilakukan analisis kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tersajikan pada tabel 2.4.1 dan tabel 2.4.2 berikut ini :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / SE Bupati Konkep Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan hasil koreksi (Bagian 1)

No.	Rancangan Awal RKPD / SE Bupati				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	DINAS KESEHATAN				Rp. 82.111.229.369,-
	Program Prioritas 2025 :				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kab. Konkep	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan kesehatan	--	--
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Konkep	- Angka Kematian Ibu (AKI) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kesakitan TB - Prevalensi Stunting	--	--
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Konkep	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	--	--
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Kab. Konkep	Presentase fasyankes yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	--	--
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Konkep	Cakupan UKBM Aktif	--	--

Untuk lebih lengkapnya kebutuhan program/kegiatan setelah Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor 52 tahun 2024, tentang Agenda Penyusunan RKPD, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan review rancangan awal RKPD untuk Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025 adalah sebagai berikut sebagaimana disajikan pada tabel 2.4.3, berikut ini :

Tabel 2.4.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / SE Bupati Konkep Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan (Bagian 2)

No.	Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kab. Konkep	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan Kesehatan (%)	100	27.677.693.280,-	DAU %	Urutan Rutin Semua SKPD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Konkep	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	102	50.308.553.239,-	DAU dan DAK 100 %	Urutan Wajib Pelayanan Dasar
			Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	10			
			Angka Kesakitan TB (per 100.000 pddk)	101			
			Prevalensi Stunting (%)	15			
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Konkep	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (%)	89	3.212.628.000,-	DAU 100 %,	Urutan Wajib Pelayanan Dasar
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Kab. Konkep	Presentase fasyankes yang memiliki alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar (%)	68	59.080.000,-	DAU 100 %	Urutan Wajib Pelayanan Dasar
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab. Konkep	Cakupan UKBM Aktif (%)	71,6	853.274.850,-	DAU 100 %	Urutan Wajib Pelayanan Dasar

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan finalisasi usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Kesehatan perlu memperhatikan usulan dan masukan program/kegiatan dari Bidang dan Seksi serta elemen masyarakat pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Desa dan Kecamatan dan Kabupaten. Usulan-usulan program/kegiatan oleh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang, dimasukkan dan dijelaskan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kab. Konkep Tahun 2025, sebagai finalisasi dari Renja ini. Beberapa usulan dan masukan dari masyarakat dapat dilihat dari tabel 2.5.1, dibawah ini :

Tabel 2.5.1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
USULAN KEC. WAWONII BARAT :					
1.					
2.					
USULAN KEC. WAWONII TENGAH :					
1.					
2.					
USULAN KEC. WAWONII SELATAN :					
1.	Pembangunan Polindes	Wawosou		1 Paket	Belum Di Akomodasi
2.	Pembangunan Polindes	Baku-baku		1 Paket	Belum Di Akomodasi
3.	Pengadaan Alat Kesehatan	Baku-baku		1 Paket	Belum Di Akomodasi
4.	Pengadaan Alat Kesehatan	Wawosou		1 Paket	Belum Di Akomodasi
5.	Pengadaan Alat Kesehatan	Wawosou		1 Paket	Belum Di Akomodasi
USULAN KEC. WAWONII TENGGARA :					
1.	Pengadaan Bidan Desa	Nambo Jaya		2 Orang	Akan Di Akomodasi
2.					
USULAN KEC. WAWONII TIMUR :					
1.	Rehabilitasi Polindes	Butuea		1 Paket	Belum Di Akomodasi
2.					
USULAN KEC. WAWONII UTARA :					
1.	Pengadaan Alat Kesehatan	Lansilowo		1 Paket	Belum Di Akomodasi
2.	Pengadaan Alat Kesehatan	Tongalere		1 Paket	Belum Di Akomodasi
USULAN KEC. WAWONII TIMUR LAUT :					
1.	Pengadaan Alat Kesehatan	Watuondo		1 Paket	Belum Di Akomodasi
2.					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan yang mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025, baik skala Nasional, Regional maupun Provinsi, adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.1 berikut ini :

Tabel 3.1.1
Telaahan Terhadap Kebijakan

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Kebijakan Nasional :		
1	Arah Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan 1. Pembangunan kesehatan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat 2. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi.	Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025	
2	Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi Kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten,	Renstra Kemenkes 2020 -2024	

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
	sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi : 1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas; 2. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas; 3. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh; 4. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan; 5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya; 6. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor Kesehatan.		
B	Kebijakan Provinsi :		
	Kebijakan Nasional Mengacu pada Prioritas Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan dan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara		

Untuk arah kebijakan Kementerian Kesehatan RI, kami mengacu pada Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024. Sedangkan dari hasil konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait RPD Dinas Kesehatan Tahun 2025, didapatkan penjelasan bahwa kebijakannya mengacu Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan

yang berisi atas 5 issue kebijakan. Hal ini didasarkan bahwa RPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Untuk Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia / Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	70,70
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat / Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	▪ Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	102
		▪ Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)	10
		▪ Angka Kesakitan TB (per 100.000 pddk)	101
		▪ Prevalensi Stunting pada Balita (%)	15

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Setelah dilakukan evaluasi Renja dan capaian Renstra tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat, penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, review terhadap rancangan awal RKPD/SE Bupati Konawe Kepulauan, kemudian memperhatikan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan. Maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 lengkap dengan Pagu Indikatif pendanaannya, seperti pada Tabel 4.1.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS KESEHATAN KAB. KONAWE KEPULAUAN

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana				Target Kinerja	Kebutuhan Dana
									DAU	POS BERHADAPAN	DAK			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Konawe Kepulauan	100%	42.619.967.571	2.537.680.000	36.953.581.798		100%	84.242.227.747
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Kab. Konawe Kepulauan	100%	42.619.967.571	2.537.680.000	36.953.581.798		100%	84.242.227.747
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	100%	27.676.493.280	-	-		100%	29.060.317.944
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	502.347.000	-	-		100%	527.464.350
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	12 Dok.	249.107.000				12 Dok.	261.562.350
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Konawe Kepulauan	4 Lap.	37.215.000				4 Lap.	39.075.750
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	3 Lap.	216.025.000				3 Lap.	226.826.250
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	25.236.957.411	-	-		100%	26.498.805.282
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Konawe Kepulauan	280 O/B	25.127.258.411				280 O/B	26.383.621.332
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Konawe Kepulauan	1 Lap.	109.699.000				1 Lap.	115.183.950
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	42.500.000	-	-		100%	44.625.000
1	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Konawe Kepulauan	1 Lap.	21.250.000				1 Lap.	22.312.500
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Konawe Kepulauan	1 Lap.	21.250.000				1 Lap.	22.312.500
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	308.187.000	-	-		100%	323.596.350
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Konawe Kepulauan	90 Unit	80.500.000				90 Unit	84.525.000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana				Target Kinerja	Kebutuhan Dana
									DAU	POS BERHADAPAN	DAK			
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Konawe Kepulauan							
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Konawe Kepulauan	18 Dok.	227.687.000				18 Dok.	239.071.350
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	1.053.785.190	-	-		100%	1.106.474.450
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	22 Paket	52.058.556				22 Paket	54.661.484
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	13 Paket	70.619.764				13 Paket	74.150.752
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	25 Paket	29.846.870				25 Paket	31.339.214
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	13 Dok.	32.940.000				13 Paket	34.587.000
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Konawe Kepulauan	12 Lap.	68.320.000				12 Lap.	71.736.000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Konawe Kepulauan	90 Lap.	800.000.000				90 Lap.	840.000.000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	1 Paket	-	-	-		1 Paket	
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan		-					
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	169.916.678	-	-		100%	178.412.512
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Konawe Kepulauan	12 Lap.	10.800.000				12 Lap.	11.340.000
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	12 Lap.	60.116.678				12 Lap.	63.122.512
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
									DAU		POS BERHADAPAN			DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	12 Lap.	99.000.000				12 Lap.	103.950.000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Konawe Kepulauan	100%	362.800.000	-	-		100%	380.940.000
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Konawe Kepulauan	4 Unit	362.800.000				4 Unit	380.940.000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Konawe Kepulauan							
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	Kab. Konawe Kepulauan	102 per 100.000 KH	12.549.458.941	2.537.680.000	35.222.614.298		< 102 per 100.000 KH	50.937.226.186
						Angka Kematian Bayi		10 per 1000 KH					< 10 per 1000 KH	
						Angka Kesakitan		101 per 100.000 pddk					< 101 per 100.000 pddk	
						Prevalensi Stunting		15%					< 15%	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	2.317.800.001	-	27.428.959.798		100%	29.862.649.799
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kab. Konawe Kepulauan	10 Unit			4.999.500.000		3 Unit	4.999.500.000
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	9 Unit			21.426.870.798		9 Unit	21.426.870.798
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Konawe Kepulauan	1 Unit	817.500.001				1 Unit	858.375.001
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Konawe Kepulauan							-
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							-

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
									DAU	POS BERHADAPAN				DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							-
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Konawe Kepulauan	2 Paket	1.500.300.000		1.002.589.000		2 Paket	2.577.904.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	9.538.860.940	2.537.680.000	7.606.917.500		100%	20.160.401.487
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	502	83.960.000		741.636.000		502	829.794.000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	502	22.370.000		56.400.000		502	79.888.500
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	450	73.170.000		-		450	76.828.500
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	2810	63.960.000		632.100.000		2810	699.258.000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	7138	67.110.000		237.450.000		7138	307.915.500
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	23313	67.110.000		327.450.000		23313	397.915.500
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	2827	48.156.000		351.600.000		2827	402.163.800
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	2820	44.740.000		-		2820	46.977.000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	873	44.740.000		-		873	46.977.000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	48	67.110.000		53.100.000		48	123.565.500
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	648	75.968.000		247.350.000		648	327.116.400
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	640	44.740.000		176.850.000		640	223.827.000

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
									DAU		POS BERHADAPAN			DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	21.770.000				9 Dok.	22.858.500
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	968.820.000		1.006.136.300		9 Dok.	2.023.397.300
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	75.975.000		182.360.000		9 Dok.	262.133.750
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	139.080.000		209.348.200		9 Dok.	355.382.200
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Konawe Kepulauan		-					-
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	22.370.000		165.250.000		9 Dok.	188.738.500
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kab. Konawe Kepulauan							
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	7 Dok.	-				7 Dok.	-
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Konawe Kepulauan	5 Dok.	272.205.000		1.398.996.000		5 Dok.	1.684.811.250
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Konawe Kepulauan	20 Dok.	3.777.312.000	2.537.680.000			20 Dok.	6.503.857.600
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Konawe Kepulauan	50 Orang	53.730.000		78.900.000		50 Orang	135.316.500
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Konawe Kepulauan	12 Spesimen	-		3.200.000		12 Spesimen	3.200.000
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Konawe Kepulauan	5 Dok.	67.805.000				5 Dok.	71.195.250
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	3.215.360.000		1.675.641.000		9 Dok.	5.051.769.000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	9 Faskes	178.859.940				9 Faskes	187.802.937

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
									DAU	POS BERHADAPAN				DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Konawe Kepulauan	9 Lap.	21.220.000		63.150.000		9 Lap.	85.431.000
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	21.220.000				9 Dok.	22.281.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kab. Konawe Kepulauan	100%	432.994.000	-	-		100%	454.643.700
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	1 Dok.	432.994.000				1 Dok.	454.643.700
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kab. Konawe Kepulauan							-
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	259.804.000	-	186.737.000		100%	459.531.200
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	1 Unit	259.804.000		186.737.000		1 Unit	459.531.200
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Kab. Konawe Kepulauan	89%	2.196.693.000	-	1.015.935.000		89%	3.322.462.650
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	30.580.000	-	173.082.000		100%	205.191.000
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	2 Dok.	20.180.000				2 Dok.	21.189.000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Konawe Kepulauan	9 Dok.	10.400.000		173.082.000		9 Dok.	184.002.000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	2.166.113.000	-	842.853.000		100%	3.117.271.650
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Konawe Kepulauan	168 Orang	2.166.113.000		842.853.000		168 Orang	3.117.271.650

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
									DAU	POS BERHADAPAN				DAK
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase fasyankes yang pemilik alat kesehatan, sedian farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan standar	Kab. Konawe Kepulauan	68%	59.080.000	-	-		68%	62.034.000
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Konawe Kepulauan	65%	11.075.000	-	-		65%	11.628.750
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Konawe Kepulauan	27 Dok.	11.075.000				27 Dok.	11.628.750
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Konawe Kepulauan	100%	48.005.000	-	-		100%	50.405.250
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Konawe Kepulauan	27 Dok.	48.005.000				27 Dok.	50.405.250
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan UKBM aktif	Kab. Konawe Kepulauan	72%	138.242.350	-	715.032.500		72%	860.186.968
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	75%	112.727.350	-	408.134.500		75%	526.498.218
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Konawe Kepulauan	36 Dok.	112.727.350		408.134.500		36 Dok.	526.498.218
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Konawe Kepulauan	100%	25.515.000	-	306.898.000		100%	333.688.750
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Konawe Kepulauan	27 Dok.	25.515.000		306.898.000		27 Dok.	333.688.750
J U M L A H							DAU		42.619.967.571					46.881.964.328
							DAK		36.953.581.798					40.648.939.978
							DBH		-					-
							POS JKN		2.537.680.000					2.791.448.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Kesehatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Sumber Dana			Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
					DAU	POS BERHADAPAN				DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			TOTAL		82.111.229.369					90.322.352.306

Langara, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Konawe Kepulauan



BISMAN ABDULLAH, SKM., M. AP
NIP. 19801118 200502 1 002

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Sebagai gambaran ketersediaan anggaran pada Tahun 2024 adalah jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan untuk menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan adalah sebesar Rp. 81.298.246.900,- yang terdiri atas anggaran belanja operasi sebesar Rp. 44.725.718.512,- dan anggaran untuk belanja modal Rp. 36.572.528.388,-

Jika dirinci dari sumber anggaran tahun 2024, yaitu yang bersumber dari DAK sebanyak Rp. 46.609.211.000,- (57,33%), dari DAU Murni sebanyak Rp. 10.952.199.800,- (13,47%), dari DAU *Spesifict Grand* Kesehatan Rp. 12.440.382.777,- (15,30%), dari DAU *Spesifict Grand* P3K Rp. 6.046.454.100,- (7,44%), dari PAD Rp. 1.250.000.000,- (1,54%), dari DBH Pusat Rp. 2.000.000.000,- (2,46%) dan dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 2.000.000.000 (2,46%) -.

Anggaran yang bersumber dari DAU Murni, DAU *Spesifict Grand* Kesehatan, DAU *Spesifict Grand* P3K, PAD, DBD dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tersebut jika diuraikan akan didapatkan bahwa sebanyak Rp. 20.873.271.346,- (25,67%) untuk Penyediaan Gaji Pegawai, dan sebanyak Rp. 20.958.879.242,- (25,78%) untuk belanja yang diperuntukkan untuk pembiayaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024.

Sedangkan untuk penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2025, dari hasil Rancangan Awal RKPD / PAGU Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas T.A. 2025 yang telah dikeluarkan oleh Bupati Konawe Kepulauan melalui Bappeda Kabupaten Konawe Kepulauan, Dinas Kesehatan mendapatkan PAGU Indikatif untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025 sebanyak Rp. 82.111.229.369,- (termasuk anggaran gaji). Sementara untuk perkiraan anggaran DAK yang bisa diperoleh sebanyak Rp. 46.609.211.000,- dan perkiraan yang bersumber dari Pos Berhadapan atau dari BPJS sebanyak Rp. 2.300.000.000,-.

Dengan bertambahnya Pagu Indikatif pada tahun anggaran 2025 untuk belanja langsung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka diharapkan dapat maksimal penggunaannya untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang cakupannya belum mencapai target sehingga dapat mendongkrak meningkatnya indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan indikator kinerja utama pada tahun 2025.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun (kelima) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan Renja dan penggunaan anggaran dengan prinsip cepat, akurat, adil, konsisten, transparan, dan efektif dan efisien;
2. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik yang bersumber dari DAU maupun yang bersumber dari DAK, maka Unit Kerja lingkup Dinas Kesehatan perlu membuat Rencana Kerja dan Rencana Penggunaan Anggaran;
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Dinkes Konkep Tahun 2025, Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran Tahun 2025 oleh unit-unit kerja dilingkup Dinas Kesehatan, mulai dari Bidang maupun UPTD Puskesmas.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, yang masih memuat hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Semoga Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

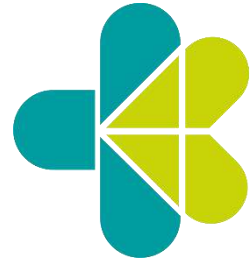
Langara, 23 Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BISMAN ABDULLAH, SKM., M. AP
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 198011182005021002

**RENCANA KERJA
RSUD KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2025 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENJA SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025. Dengan semangat yang tinggi sebagai rumah sakit yang baru berdiri RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan.

Langara, 22 Juli 2024

Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan
Direktur,



dr. Ulam Fridslan

NIP. 19860523 201503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematikan Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.2. Program dan Kegiatan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB V PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA di mulai dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025. Selanjutnya proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Sebagai Dokumen resmi Pemerintah

Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai OPD yang menangani urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan mengacu pada Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah sebagai dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Kesehatan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Konawe Kepulauan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah kedalam Program/Kegiatan tahunan;

2. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.4. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah yaitu sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, Menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten Provinsi

dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Berisi tentang Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Catatan Ketersediaan Anggaran, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Kab. Konawe Kepulauan s/d Tahun 2023

Kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD thn 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn 2023	
					Target Renja PD thn 2022	Realisasi Renja PD thn 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda dalam pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	6 Dok	6	6%
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	3	100%
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1	100%
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1	100%
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 OB	74 OB	74 OB	74 OB	100%	74 OB	74	100%
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3	300%
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pkt Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	1 Pkt	1	100%
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%

1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pkt Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	1 Pkt	1	100%
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pkt Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	1 Pkt	1	100%
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pkt Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	1 Pkt	1	100%
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pkt Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	100%	1 Pkt	1	100%
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	100%	48 Dok	48	100%
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Lap	67 Lap	67 Lap	67 Lap	100%	67 Lap	67	100%
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5	100%
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	50	100%
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	100%
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	100%
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	12	100%
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8	100%
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10	100%
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8	100%
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	50	100%
1 02 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.5 Ha	0.5 Ha	0.5 Ha	0.5 Ha	100%	0.5 Ha	0.5	100%

1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	126 /100.000 KH	126 /100.000 KH	126 /100.000 KH	126 /100.000 KH	100%	126 /100.000 KH	378	300%
		Angka kematian bayi	18 /1.000 KH	18 /1.000 KH	18 /1.000 KH	18 /1.000 KH	100%	18 /1.000 KH	53.1	300%
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3	100%
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3	100%
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Pkt	50 Pkt	50 Pkt	50 Pkt	100%	50 Pkt	50	100%
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Pkt	30 Pkt	30 Pkt	30 Pkt	100%	30 Pkt	30	100%
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11	100%
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	70 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	100%	70 Unit	70	100%
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	100	100%
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	4	100%
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	60 Dok	60 Dok	60 Dok	60 Dok	100%	60 Dok	60	100%
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12	100%
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	100%
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%

1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100%	100 Org	100	100%
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab./Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	203 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100%	50 Org	50	25%

1. Dengan berupaya semaksimal mungkin mencari penganggaran yang sebesar-besarnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.
2. Mengutamakan pemberian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas yang dapat mendorong pencapaian target program pada akhir tahun pelaksanaan Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 2.2.1** berikut ini :

**Tabel 2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2023**

Indikator	Standar Nasional	IKK	Target Renstra 2023	Realisasi Capaian 2023	Proyeksi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Ibu (AKI)	305/100.000 KH		111,6		
Angka Kematian Bayi (AKB)	24/1.000 KH		13,1		

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukannya peningkatan baik sarana dan prasarana. Perkembangan Rumah Sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui akreditasi. Sebagai rumah sakit baru saat ini RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan sudah masuk dalam klasifikasi D sesuai dengan Perpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dimana setiap

Kabupaten/Kota wajib memiliki Rumah Sakit Kelas D. Sebagai daerah yang baru yang masih memiliki keterbatasan anggaran sehingga juga berpengaruh pada pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain itu RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan merencanakan :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga, baik tenaga medis maupun paramedis. Melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis.
2. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
3. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku.
4. Menempuh Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada Bab V khususnya tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 yang telah dikeluarkan BAPPEDA Kab. Konawe Kepulauan, sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100 %	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	6	6 Dok	6	6
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3	3 Dok	3	3
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1	1 Lap	1	1
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1	1 Lap	1	1
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 OB	74	74 OB	74	74
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1	1 Lap	1	1
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD	Jumlah Pkt Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pkt	1	1 Pkt	1	1
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	Jumlah Pkt Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1	1 Pkt	1	1
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD	Jumlah Pkt Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1	1 Pkt	1	1

-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD	Jumlah Pkt Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	1	1 Pkt	1	1
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	Jumlah Pkt Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	1	1 Pkt	1	1
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	RSUD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dok	48	48 Dok	48	48
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Lap	67	67 Lap	67	67
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	5	5 Unit	5	5
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50	50 Unit	50	50
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12	12 Lap	12	12
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12	12 Lap	12	12
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12	12 Lap	12	12
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100 %	100	100
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1 Unit	1	1
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8	8 Unit	8	8
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10	10 Unit	10	10
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8	8 Unit	8	8
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 Unit	50	50 Unit	50	50
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	RSUD	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.5 Ha	0.5	0.5 Ha	0.5	0.5

B.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD	Angka kematian ibu	126 /100.000 KH	126	126 /100.000 KH	126	126
			Angka kematian bayi	18 /1.000 KH	17.7	18 /1.000 KH	17.7	17.7
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100 %	100	100
-	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1	1 Unit	1	1
-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3	3 Unit	3	3
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	3	3 Unit	3	3
-	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Pkt	50	50 Pkt	50	50
-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Pkt	30	30 Pkt	30	30
-	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11 Unit	11	11 Unit	11	11
-	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	70 Unit	70	70 Unit	70	70
-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100	100 Unit	100	100
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100 %	100	100
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dok	4	4 Dok	4	4
-	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	RSUD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	60 Dok	60	60 Dok	60	60
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	12	12 Dok	12	12
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	RSUD	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1	1 Unit	1	1

C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD	Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100	100 %	100	100
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	100	100 %	100	100
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Org	100	100 Org	100	100
2.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100	100 %	100	100
-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Org	50	50 Org	50	50

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kemenkes 2020-2025	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Tujuan (2): Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Sasaran (2): Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Tantangan untuk mempertahankan Akreditasi yang dicapai	Komitmen Staf Rumah Sakit dalam mempertahankan akreditasi yang dicapai.	1. Komitmen jajaran Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan semakin meningkat 2. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
	Indikator (4) : Persentase RS terakreditasi sebesar 100%.			
2	Tujuan (4): Peningkatan sumber daya kesehatan. Sasaran : Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai	Belum Adanya dokter Spesialis	Terbatasnya anggaran untuk memenuhi 4 dokter spesialis dasar.	

	standar			
	Indikator (2) : Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) sebesar 90%			

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Untuk Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	▪ Angka Kematian Ibu (AKI) ▪ Angka Kematian Bayi (AKB)	106,8 per 100.000 KH 11,5 per 1.000 KH

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pencapaian NSPK dan SPM.

Setelah dilakukan evaluasi Renja dan capaian Renstra tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat, penelaahan terhadap kebijakan nasional, review terhadap rancangan awal RKPD, kemudian memperhatikan Isu-isu Penting Penyelenggaraan tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah. Maka disusunlah Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	4	5		6	7	8	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				31,711,841,832			31,912,255,296
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				31,711,841,832			31,912,255,296
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD	100	%	11,270,495,467		100 %	11,270,495,467
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	100	%			100 %	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	3	Dok	28,970,000	APBD	3 Dok	28,970,000
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	1	Lap	8,315,000	APBD	1 Lap	8,315,000
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD	1	Lap	8,315,000	APBD	1 Lap	8,315,000
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	100	%			100 %	-
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	77	OB	4,773,809,900	APBD	77 OB	4,773,809,900
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	1	Lap	6,500,000	APBD	1 Lap	6,500,000
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD	100	%			100 %	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD	1	Paket	50,000,000	APBD	1 Paket	50,000,000
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD	100	%			100 %	-
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	1	Paket	16,185,000	APBD	1 Paket	16,185,000
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD	1	Paket	49,858,000	APBD	1 Paket	49,858,000
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD	1	Paket	49,930,500	APBD	1 Paket	49,930,500
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	1	Paket	30,315,000	APBD	1 Paket	30,315,000
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD	48	Dok	5,040,000	APBD	48 Dok	5,040,000
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	90	Lap	305,336,000	APBD	90 Lap	305,336,000
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD	100	%			100 %	-
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	2	Unit	250,000,000	APBD	2 Unit	250,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	29	Unit	1,300,406,067	APBD	29	Unit	1,300,406,067
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	100	%			100	%	-
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUD	12	Lap	7,500,000	APBD	12	Lap	7,500,000
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	12	Lap	515,035,000	APBD	12	Lap	515,035,000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	12	Lap	450,000,000	APBD	12	Lap	450,000,000
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD	100	%			100	%	-
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD	18	Unit	66,660,000	APBD	18	Unit	66,660,000
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	14	Unit	874,000,000	APBD	14	Unit	874,000,000
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	60	Unit	96,600,000	APBD	60	Unit	96,600,000
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD	8	Unit	287,720,000	APBD	11	Unit	287,720,000
1 02 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	RSUD	1.6	Ha	2,090,000,000	APBD	1.6	Ha	2,090,000,000
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD	126 /100.000 KH		15,101,426,365		126 /100.000 KH		15,248,440,628
			17.7 /1.000 KH				17.7 /1.000 KH		-
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	100	%			100	%	-
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD	1	Unit	970,000,000	APBD	1	Unit	979,700,000
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	10	Unit	4,612,772,465	APBD	10	Unit	4,658,900,189
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	50	Unit	225,405,900	APBD	50	Unit	227,659,959
1 02 02 2.01 22	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	1	Unit	3,961,878,000	APBD	1	Unit	4,001,496,780
1 02 02 2.01 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	RSUD	1	Paket	2,677,750,000	APBD	1	Paket	2,704,527,500
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	100	%			100	%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Sumber	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	1	Dok	166,500,000	APBD	1	Dok	168,165,000
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	RSUD	120	Dok	87,120,000	APBD	120	Dok	87,991,200
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RSUD	1	Dok	2,000,000,000	APBD	1	Dok	2,020,000,000
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	RSUD	1	Unit	400,000,000	APBD	1	Unit	400,000,000
									-
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD	100	%	5,339,920,000		100	%	5,393,319,200
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	RSUD	100	%			100	%	-
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD	73	Orang	5,136,000,000	APBD	73	Orang	5,187,360,000
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	100	%			100	%	-
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	40	Orang	203,920,000	APBD	40	Orang	205,959,200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar Rencana Kerja RSUD kab. Konawe Kepulauan tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan. dengan Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp31,711,841,832 (*tiga puluh satu miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun terakhir (kelima) dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan Renja dan penggunaan anggaran dengan prinsip cepat, akurat, adil, konsisten, transparan, dan efektif dan efisien;
2. Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari DAU maupun yang bersumber dari DAK,

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara simultan harus segera melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah untuk meningkatkan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi kebutuhan tenaga, baik tenaga medis maupun paramedis. Khususnya tenaga paramedis profesional dan tenaga non medis profesional.
2. Melengkapi peralatan medik dan obat -obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai - nilai di masyarakat. *Brand image* Rumah Sakit diharapkan meningkat secara signifikan.

4. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, *strategicaction plan*, *accountability system*, *supporting IT system* dan *standar operating procedure* dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen Rumah Sakit.
5. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku.



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

**KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN**

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarokatuh

PujiSyukurkitapanjatkankehadirat Allah
SubhanaWaTa'alaatasrahmatdanhidayah-
NyasehinggaRancanganAwalRencanaKerjaDinasPerumahandanKawasanPermu-
kimanKabupatenKonaweKepulauanTahun
2025dapattersusunsebagai pedomandalampelaksanaankebijakandan program
pembangunanpadaurusanperumahandankawasanpermukimansertaurusanper-
tanahanuntukkurunwaktu lima tahunsecaraterencana, terarah, terpadu,
danberkesinambungan. RencanaKerja (Renja) Perangkat Daerah (PD)
merupakanPerencanaanTahunandariRencanaStrategis (Renstra) PD Tahun
2021-2026 yang berjangkalimatahun.

RencanaKerjamemberikangambaranlebihmendetailtentangsasaranserta
program dankegiatan yang
ditetapkanebagaisuatustrategiuntukmencapaiasarantersebut,
sehinggadalamdokumeninimemuat program-program, kegiatan-kegiatan,
dansubkegiatan-subkegiatan yang
akandilaksanakandalamsatutahunanggarandenganindikator output dan
indicator outcome yang akandicapai.

DalampenyusunanRenjaini, tidaklupa kami menyampaikan rasa
hormatdanterimakasih yang sebesar-besarnyakepadasemuapihak yang
telahmembantudanmemberikandorongandalampenyusunanRenjaini,
masukandan saran
tentunyasangatharapkanuntuklebihmenyempurnakanRenjaini.Semogaapa
yang telahdiberikanmendapatrahmat/karuniadariTuhan Yang MahaEsa

Waalaikum Salam Warohmatullahi Wabarokatuh

Langara, Januari 2024
KepalaDinas
PerumahandanKawasanPermukiman
KabupatenKonaweKepulauan

Ir. MUNANDAR MUCHARAM, ST., M.Si
NIP. 19791208 200604 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Stategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe kepulauan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang ingin di capai.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 Nomor 4);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 02;
 - p. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
2. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Menyiapkan Kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan 5 tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2023 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Evaluasi Rencana Kerja tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025

Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
				Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD								100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji (bulan)			14 bulan	14 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			14 orang	14 orang	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang di Sediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

**Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

**Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya			12 bulan	12 bulan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan /Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025

Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Junlah rumah yang mendapat perbaikan atau peningkatan kualitas			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umumyang menunjang fungsi hunian			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi dan Sihnroniassi dalam Rangka Penyediaan PSU Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaanprasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG									
Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong									
Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	Jumlah laporan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Pemanfaatan tanah kosong	Jumlah pemanfaatan tanah kosong			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH									
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota									
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah laporan koordinasi dan sinkronikasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota kabupaten/kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2023

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2026, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan pada tahun 2023, tidak seluruhnya mencapai target yang ditetapkan;
2. Dari 12 (dua belas) kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, , tidak seluruhnya mencapai target yang ditetapkan.
3. Dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dilaksanakan pada Tahun 2023, tidak seluruhnya mencapai target yang ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan Aparatur Pemerintahan Daerah serta masyarakat untuk menyikapinya. Agar tujuan kebijakan-kebijakan Nasional dan daerah dapat dicapai, serta diperlukan kemampuan atau kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan atau kapasitas adalah kemampuan seorang individu, dan sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi - fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan penyesuaian dinamis sesuai Fungsi dan tujuan tersebut. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan pengeluaran (Out put) dan hasil (Out come). Kondisi ini diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memiliki kemampuan atau kapasitas dalam peningkatan percepatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai lembaga yang berkompeten dalam penanganan rumah tidak layak huni harus mampu mewujudkan Visi dan Misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kemampuan atau kapasitas tersebut tergantung pada SDM yang handal, sarana prasarana pendukung lainnya. Antara lain gedung kantor yang representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang digunakan untuk penunjang aktifitas maupun pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan IT (Jaringan komunikasi data yang baik) dan pemanfaatan internet, ini dapat dimanfaatkan oleh pejabat Struktural, Staf PNS.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja Dinas berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan yakni SPM, IKU dan IKK.

1. SPM

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait indikator kinerja SPM, didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah.

Capaian SPM sampai dengan Triwulan II tahun 2024 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan belum ada. Karena sampai dengan triwulan II tahun 2024, tidak ada status bencana dan tidak ada relokasi program Pemerintah.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas”. Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan guna mewujudkan Visi Kepala Daerah adalah Misi ke-1 yaitu “Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Permukiman dan Prasarana Wilayah”.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Kepulauan yakni Penurunan Luas Kawasan Permukiman Berstatus Kumuh.

Capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 8,54 % dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 11 %, hal ini disebabkan karena belum terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian IKU.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Analisis Kinerja Pelayanan terkait indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut :

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Layanan Rumah Korban Bencana atau relokasi rumah korban bencana (%)	50	50	100	60
2	Cakupan Layanan Kawasan Permukiman (%)	60	50	83,33	65
3	Cakupan Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian layak huni akibat relokasi/program (%)	50	45	90	60
4	Cakupan luas lahan bersertifikat (%)	75	70	93,33	80
5	Cakupan wilayah kecamatan yang memiliki zonasi harga tanah (%)	56	100	178,57	74

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan

2.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait dapat kita identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

1. Layanan Infrastruktur dasar yang masih rendah
2. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur permukiman yang masih rendah
3. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR yang masih rendah
4. Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang masih rendah
5. Ketersediaan lahan untuk pembangunan yang masih rendah
6. Status kepemilikan lahan pemerintah daerah yang masih rendah
7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang kinerja organisasi masih rendah
8. Jumlah, Kapasitas dan kompetensi SDM ASN yang masih rendah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		39.149.000	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			39.149.000	
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.500.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	

1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.500.000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.500.000	
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	13.149.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	13.149.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.452.930.569	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.452.930.569	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Gaji (bulan)	14 bulan	1.446.430.569	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Gaji (bulan)	14 bulan	1.446.430.569	

2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	6.500.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			110.426.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			110.426.500	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 orang	40.426.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 orang	40.426.500	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	14 orang	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	14 orang	70.000.000	

			Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			503.416.253	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			503.416.253	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	12 bulan	10.969.970	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah {Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	12 bulan	10.969.970	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	12 bulan	67.282.908	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	12 bulan	67.282.908	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Logistik Kantor yang di Sediakan	12 bulan	11.140.575	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Logistik Kantor yang di Sediakan	12 bulan	11.140.575	

4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	12 bulan	6.690.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	12 bulan	6.690.800	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	5.040.000	
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	9.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	9.040.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	393.252.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	393.252.000	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			354.496.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			354.496.400	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	58.496.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	58.496.400	

6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	33 orang	294.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	33 orang	294.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			301.950.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			301.950.000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun	67.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 tahun	67.900.000	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 tahun	34.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 tahun	34.050.000	

	Operasional atau Lapangan		dan di bayarkan pajak dan perizinannya			Operasional atau Lapangan		dan di bayarkan pajak dan perizinannya			
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Paket	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Paket	200.000.000	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			296.087.120	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			296.087.120	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			96.087.120	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			96.087.120	
1.1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian	1 dok	-	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian	1 dok	-	

	Tertangani		Sebelumnya yang Belum Tertangani			Tertangani		Sebelumny a yang Belum Tertangani			
1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 dok	-	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 dok	-	
1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 dok	47.584.760	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kot a	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	1 dok	47.584.760	
1.4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat , Rumah	1 dok	48.502.360	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyaraka t, Rumah	1 dok	48.502.360	

			Susun dan Rumah Khusus					Susun dan Rumah Khusus			
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			200.000.000					200.000.000	
2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi	Unit	200.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi	Unit	200.000.000	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.173.053.035	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.173.053.035	

1	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.254.667.240	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.254.667.240	
1.1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	-	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Kegiatan	-	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1 dok	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1 dok	-	

1.3	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Penyusuna n/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 dok	250.000.000	Penyusunan/Re view/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Penyusuna n/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 dok	250.000.000	
1.4	Pembentukan/P embinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukima n Kumuh	1 Kegiatan	-			Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyaraka t di Permukima n Kumuh	1 Kegiatan	-	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.004.667.240	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.004.667.240	
2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah yang mendapat perbaikan		918.385.795	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah yang mendapat perbaikan		918.385.795	
2.2	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Jumlah rumah yang mendapat perbaikan		-	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Jumlah rumah yang mendapat		-	

	Beserta PSU	PERMUKIMAN	beserta PSU			Beserta PSU	PERMUKIMAN	perbaikan beserta PSU			
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		86.281.445	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		86.281.445	
2.4	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		-	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		-	
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.440.973.880	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.440.973.880	

1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.440.973.880	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.440.973.880	
1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perencanaaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	-	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Perencanaaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	-	
1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umumyang menunjang fungsi hunian	1 Kegiatan	1.400.766.480	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umumyang menunjang fungsi hunian	1 Kegiatan	1.400.766.480	
1.3	Koordinasi dan Synchronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU Umum Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	1 dokumen	40.207.400	Koordinasi dan Synchronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU Umum Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	1 dokumen	40.207.400	

			umum perumahan					umum perumahan			
E	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			492.007.478	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			492.007.478	
1	Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			492.007.478	Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			492.007.478	
1.1	Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil Pelaksanaa n Inventarisasi tanah kosong	1 dokumen	252.035.060	Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil Pelaksanaa n Inventarisa si tanah kosong	1 dokumen	252.035.060	
1.2	Pemanfaatan tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil Pemanfaata n tanah kosong	1 dokumen	239.972.418	Pemanfaatan tanah kosong	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah laporan hasil Pemanfaat an tanah kosong	1 dokumen	239.972.418	
F	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.157.360	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.157.360	

1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.157.360	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			83.157.360	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	1 dokumen	35.294.560	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	1 dokumen	35.294.560	
1.2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah laporan koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota kabupaten/	1 dokumen	47.862.800	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	jumlah laporan koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota kabupaten	1 dokumen	47.862.800	

			kota					/kota			
--	--	--	------	--	--	--	--	-------	--	--	--

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Konawe Kepulauan

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagiandari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-upplanning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL****Telaahan Renstra Kementerian PU Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan**

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, terdapat dua Kementerian yang terlibat secara langsung dalam urusan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, terdapat dua Kementerian yang terlibat secara langsung dalam urusan bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Arah kebijakan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman yang diamanatkan dalam Undang- Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
 - b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
 - c. Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
2. Undang- undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf yaitu:

Dalam penyelenggaraan perumahan dan dan Kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah anatar lain sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
- c. teknologi di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman;
- d. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, Perumahan permukiman, lingkungan hunian, dan Dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan.
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- i. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- k. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan Dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- l. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Dan Kawasan Permukiman;

- m. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan Dan Kawasan Permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
 - n. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - o. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
 - p. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
 - q. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Rakyat Umum dan Perumahan Nomor: 23 Tahun 20120 tentang Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020– 2024. Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020– 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat diwujudkan melalui pelaksanaan 4 Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan inf rastruktur wilayah yang terpadu.

- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2020-2024 adalah :

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta risiko/kerentanan bencana alam.
- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN selama lima tahun ke depan adalah : Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut, kemampuan lembaga dalam melaksanakan pelayanan publik bidang pertanahan dan ruang difokuskan melalui dua misi yaitu :

- 1) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia Misi pertama yaitu: “Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan”, dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan, yaitu:
 - a. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sementara itu, misi kedua adalah “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia”, yang diimplementasikan dalam tujuan ke-3 yaitu: “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran strategis untuk mendukung tercapainya rancangan tujuh agenda RPJMN ke IV. Oleh karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional membutuhkan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung tercapainya agenda RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai Kementerian dalam mendukung RPJMN. Strategi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian berbasis LMP adalah penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal (kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian) dengan pendekatan LMP yang berbasis data dengan cakupan lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan. Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah kepastian informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyusunan output produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun secara efisien dan efektif, meniadakan proses redundansi yang tidak perlu dan menutup celah yang ada. Dalam hal ini, peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pencapaian misi pertama

dan kedua melalui digitalisasi proses dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan pertanahan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh) dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas”**. Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan guna mewujudkan Visi Kepala Daerah adalah Misi ke-1 yaitu **“Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Kawasan Permukiman dan Prasarana Wilayah”**.

3.2.1 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut tujuan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan Keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung Pertumbuhan dikabupaten Konawe Kepulauan

3.2.2 Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi perlu diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan tahunan organisasi agar tercapai tujuan organisasi, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan serta RPJMD

Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada bidang kesekretariatan, prioritas program dan kegiatan difokuskan pada pembenahan kinerja layanan, termasuk sistem pelaporan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada bidang Perumahan dan permukiman prioritas program dan kegiatan berfokus pada penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan, serta penyediaan penerangan jalan umum. Pada bidang pertanahan prioritas program adalah pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah mulai dari pengadaannya guna mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah sampai dengan legalitasnya (sertifikat).

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi 6 (empat) program dan 12(sebelas) kegiatan yang terdiri dari :

- a. Program Teknis, merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat dan terkait langsung dengan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan (Pelayanan Eksternal) :
 1. Program Pengembangan Perumahan.
 2. Program Kawasan Permukiman.
 3. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 4. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 5. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Reguler/Generik, merupakan program yang bersifat internal untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur administrasi pemerintah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabuapten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan insfrastuktur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	2.762.368.722	DAU	100%	2.825.661.340
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	39.149.000	DAU	100%	39.149.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	6.500.000	DAU	100%	6.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	6.500.000	DAU	100%	6.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	6.500.000	DAU	100%	6.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	6.500.000	DAU	100%	6.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	13.149.000	DAU	100%	13.149.000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	1.452.930.569	DAU	100%	1.516.223.187
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji (bulan)	KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	1.446.430.569	DAU	100%	1.509.723.187
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	6.500.000	DAU	100%	6.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	110.426.500	DAU	100%	110.426.500
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	40.426.500	DAU	100%	40.426.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	70.000.000	DAU	100%	70.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	503.416.253	DAU	100%	503.416.253
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	KAB. KONawe KEPULAUAN	100%	10.969.970	DAU	100%	10.969.970

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Sediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	67.282.908	DAU	100%	67.282.908
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang di Sediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	11.140.575	DAU	100%	11.140.575
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	6.690.800	DAU	100%	6.690.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	5.040.000	DAU	100%	5.040.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	9.040.000	DAU	100%	9.040.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	393.252.000	DAU	100%	393.252.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	354.496.400	DAU	100%	354.496.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	2.000.000	DAU	100%	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	58.496.400	DAU	100%	58.496.400

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	294.000.000	DAU	100%	294.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	301.950.000	DAU	100%	301.950.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	67.900.000	DAU	100%	67.900.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	34.050.000	DAU	100%	34.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	200.000.000	DAU	100%	200.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	296.087.120	DAU	100%	296.087.120
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	96.087.120	DAU	100%	96.087.120
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-

	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	47.584.760	DAU	100%	47.584.760
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	48.502.360	DAU	100%	48.502.360
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	200.000.000			200.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	200.000.000			200.000.000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	1.254.667.240	DAU	100%	1.254.667.240
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	250.000.000	DAU	100%	250.000.000

	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan/ Review/ Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	250.000.000	DAU	100%	250.000.000
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	1.004.667.240	DAU	100%	1.004.667.240
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang mendapat perbaikan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	918.385.795	DAU	100%	918.385.795
	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah yang mendapat perbaikan beserta PSU	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	86.281.445	DAU	100%	86.281.445
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	1.440.973.880	DAU	100%	1.440.973.880
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	1.440.973.880	DAU	100%	1.440.973.880
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	-	DAU	100%	-
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi perumahan yang di sediakan prasarana, sarana, dan utilitas umumyang menunjang fungsi hunian	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	1.400.766.480	DAU	100%	1.400.766.480
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan PSU Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	40.207.400	DAU	100%	40.207.400

	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	492.007.478	DAU	100%	492.007.478
	Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	492.007.478	DAU	100%	492.007.478
	Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	252.035.060	DAU	100%	252.035.060
	Pemanfaatan tanah kosong	Jumlah laporan hasil Pemanfaatan tanah kosong	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	239.972.418	DAU	100%	239.972.418
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	83.157.360	DAU	100%	83.157.360
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	83.157.360	DAU	100%	83.157.360
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah laporan Koordinasi dan sinkronikasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1(satu) kabupaten/kota	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	35.294.560	DAU	100%	35.294.560
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota kabupaten/kota	KAB. KONAWE KEPULAUAN	100%	47.862.800	DAU	100%	47.862.800

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
TOTAL	6.329.261.800		6.392.554.418

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Konawe Kepulauan

Langara, 2024
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Konawe Kepulauan

Ir. MUNANDAR MUCAHARAM, ST., M.Si
NIP. 19791208 200604 1 011

BAB V

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan Tata Cara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa masing SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan). Serta Renstra SKPD yang telah disusun berdasarkan Visi, Misi Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026 dan dengan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Jadi Renstra ini merupakan acuan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bentuk nyata dari Visi ditetapkanlah Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh pernyataan Dinas memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KAB. KONAWE KEPULAUAN**

Jl. Poros Langara - Lampeapi KM.03 Kompleks Perkantoran

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam “*Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) dalam bingkai lingkaran hati emas*”. Semoga dengan telah tersusunnya RENJA SKPD ini, pelaksanaan Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat : Bapak Bupati Konawe Kepulauan, Bapak Wakil Bupati Konawe Kepulauan dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf dilingkungan Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan terwujudnya penyusunan perencanaan kerja SKPD Tahun 2025 ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.



Langara, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Konawe Kepulauan

H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670510 199412 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	5
2.1. Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial	16
2.4. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	15
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	19
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	17
4.1. Program dan Kegiatan.....	21
BAB V PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD (RENJA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tahun 2025, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang sosial yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD dengan mempertimbangkan hasil capaian tahun sebelumnya.
2. Penyelarasan rencana program/kegiatan SKPD dengan rencana program/kegiatan hasil Musyawarah Pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Penajaman Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 dilakukan dalam forum gabungan SKPD untuk menampung aspirasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang telah disusun.
4. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan hasil pembahasan Forum Musrembang RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Penajaman Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan setelah Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan.
6. Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tahun 2025, ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 Selanjutnya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial 2025, sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 dan rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan pelaksanaan tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dan merupakan kelanjutan RENSTRA Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 6. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan E-KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3).
 16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD tahun anggaran;

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Sosial kab. Konawe Kepulauan

Tujuan: Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, Proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, dan Keterkaitan Perubahan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD

Memuat tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menguraikan mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan mengenai tentang perbandingan mengenai rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan tentang hasil kajian program dan kegiatan dari pemangku kepentingan

III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Penjelasan mengenai telaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta terkait dengan tupoksi SKPD

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Menguraikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan

Menguraikan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPDP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indicator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Capaian Renja dan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																	Nasional	Daerah				
1	2				3	-	-			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						DINAS SOSIAL				2.024.627.113								2.101.627.113				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.024.627.113								2.101.627.113					
	1	0 6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				2.024.627.113								2.101.627.113					
53	1	0 6	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah	7 Kegiatan	100%	100%	7 Kegiatan	1.585.877.113	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	1.635.877.113	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	3 Sub Kegiatan	100%	100%	3 Sub Kegiatan	28.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	28.000.000	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Tersedianya dokumen Renja & Renstra SKPD	5 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	6.500.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	6.500.000	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	6.500.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	6.500.000	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

								Tersedianya dokumen LAKIP SKPD	5 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	15.000.000	DINAS SOSIAL
		1	06	01	2.002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Laporan keuangan perangkat daerah	2 Sub Kegiatan	100%	100%	2 Sub Kegiatan	739.977.113	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	739.977.113	DINAS SOSIAL
		1	06	01	2.002	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan SKPD	7 Orang/tahun	100%	100%	7 Orang/tahun	733.477.113	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	733.477.113	DINAS SOSIAL
		1	06	01	2.002	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
								Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan	6.500.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	6.500.000	DINAS SOSIAL
		1	06	01	2.005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan pendidikan pelatihan pegawai OPD	2 Sub Kegiatan	100%	100%	2 Sub Kegiatan	108.200.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	158.200.000	DINAS SOSIAL
		1	06	01	2.005	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
								Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Orang	100%	100%	25 Orang	8.200.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan	-	100%	8.200.000	DINAS SOSIAL

																Kebudayaan				
	106	01	205	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Terlaksanya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	100%	100%	10 Orang	100.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	150.000.000	DINAS SOSIAL	
	106	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pada OPD	7 Sub Kegiatan	100%	100%	7 Sub Kegiatan	259.700.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	259.700.000	DINAS SOSIAL	
	106	01	206	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	3.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	3.000.000	DINAS SOSIAL	
	106	01	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	1.500.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	1.500.000	DINAS SOSIAL	
	106	01	206	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Tersedianya makan minum, Pegawai, rapat dan ATK kantor	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	30.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	30.000.000	DINAS SOSIAL	
	106	01	206	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	10.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	10.000.000	DINAS SOSIAL	

	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
				0			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Terbitan	100%	100%	4 Terbitan	5.200.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	5.200.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
				0			Tersedianya makan minum tamu	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	10.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
				0			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	200.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	200.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan	100%	100%	1 Sub Kegiatan	100.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	100.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
				0			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	100.000.000	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	100%	100%	3 Sub Kegiatan	285.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	285.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	30.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Tersedianya pulsa listrik kantor	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	12.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	12.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Tersedianya jasa cleaning service dan operator komputer, sopir, TKSK, Verifikator dan Tagana	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	243.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	243.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	100%	100%	1 Sub Kegiatan	65.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	65.000.000	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	65.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	65.000.000	DINAS SOSIAL
54	1	0	0	2.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Masyarakat yang menjadi IKU IKK OPD	1 Kegiatan	100%	100%	1 Kegiatan	60.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	60.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	2 Sub Kegiatan	100%	100%	2 Sub Kegiatan	60.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	60.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Orang PSM	100%	100%	96 Orang PSM	30.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	30.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	100%	100%	4 Lembaga	30.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	30.000.000	DINAS SOSIAL
55	1	0	0	4.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Masyarakat yang menjadi IKU IKK OPD	2 Kegiatan	100%	100%	2 Kegiatan	55.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	55.000.000	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3 Sub Kegiatan	100%	100%	3 Sub Kegiatan	40.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	40.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang dalam 1 tahun	100%	100%	50 orang dalam 1 tahun	25.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	25.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang dalam 1 tahun	100%	100%	10 orang dalam 1 tahun	5.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	5.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang dalam 1 tahun	100%	100%	5 orang dalam 1 tahun	10.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	10.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tersediannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2 Sub Kegiatan	100%	100%	2 Sub Kegiatan	15.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

							Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang dalam 1 tahun	100%	100%	10 orang dalam 1 tahun	5.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	5.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	202	0013	Pemberian Layanan Rujukan															
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang dalam 1 tahun	100%	100%	5 orang dalam 1 tahun	10.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	10.000.000	DINAS SOSIAL	
56	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Perlindungan Sosial Masyarakat yang menjadi IKU IKK OPD	2 Kegiatan	100%	100%	2 Kegiatan	202.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	100%	214.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	201			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak anak terlantar	2 Sub Kegiatan	100%	100%	2 Sub Kegiatan	15.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	15.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2001	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar															
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang dalam 1 tahun	100%	100%	10 orang dalam 1 tahun	5.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	5.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	05	2001	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar															
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang dalam 1 tahun	100%	100%	5 orang dalam 1 tahun	10.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	10.000.000	DINAS SOSIAL	

	1	0	0	2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tata kelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	3 Sub Kegiatan	100%	100%	3 Sub Kegiatan	187.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	199.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15.000 orang dalam 1 tahun	100%	100%	15.000 orang dalam 1 tahun	105.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	105.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	7.000 orang dalam 1 tahun	100%	100%	7.000 orang dalam 1 tahun	12.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	24.000.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000 orang dalam 1 tahun	100%	100%	1.000 orang dalam 1 tahun	70.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	70.000.000	DINAS SOSIAL
57	1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terlaksananya Penanganan bencana yang menjadi IKU IKK OPD	2 Kegiatan	100%	100%	2 Kegiatan	121.750.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		-	100%	136.750.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 Sub Kegiatan	100%	100%	1 Sub Kegiatan	36.750.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	36.750.000	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Makanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang dalam 1 tahun	100%	100%	75 orang dalam 1 tahun	36.750.000	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	36.750.000	DINAS SOSIAL

	1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya emberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	1 Sub Kegiatan	100%	100%	1 Sub Kegiatan	85.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	100.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	202	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang Tagana dalam 1 tahun	100%	100%	65 Orang Tagana dalam 1 tahun	85.000.000	Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif 6. Sosial dan Kebudayaan	-	100%	100.000.000	DINAS SOSIAL

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan.

Berikut **Tabel 2.2** mengenai Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.2
Analisis Capaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Catat an Anali sis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (sandang Pangan dan Perumahan)	√	√	65%	74%	82%	91%	65%	74%	82%	91%	
2	Meningkatnya Peran dan Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap PMKS	√	√	75%	80%	85%	90%	75%	80%	85%	90%	
3	Meningkatnya Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Sosial.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah. dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kab Konawe Kepulauan.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 meliputi ;

1. Kepala Dinas 1 orang.
2. Sekretaris Dinas 1 orang.
3. Kepala Bidang Teknis 2 orang.
4. Pejabat Fungsional 2 Orang.
5. Staf 2 Orang

Selain dari pada itu pelayanan Dinas Sosial Tahun 2025 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melakukan Pelayanan Administrasi karena Dinas Sosial masih kekurangan SDM, maka Dinas Sosial ditunjang oleh Tenaga PHL yang ada di kantor Dinas Sosial adalah sebanyak 20 orang.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Kesadaran dan peran serta masyarakat masih rendah.
2. Sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Perencanaan pelayanan kurang terarah dan terpadu.
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) belum merata.
5. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan

2.3.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan.

1. Peluang

- a. Kerjasama dengan Ketua RT dan RW;
- b. Dukungan dari Instansi berwenang lainnya.

2. Ancaman

- a. Keadaan ekonomi penduduk yang cenderung terpuruk;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari bahwa penerima bantuan sosial adalah orang yang betul masuk ke dalam kriteria PMKS.

2.4 Penelaah Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan juga disusun berdasarkan

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka kebijakan umum yang ditempuh:

- a. Mengelola program dan kegiatan sesuai prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- b. Membangun jejaring dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan prinsip saling menguntungkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, **Tujuan dan Sasaran RENJA**

3.2.1 Tujuan

Sebagaimana diketahui bahwa visi Kab. Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 ialah *“Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan tangguh) dalam bingkai lingkaran hati Emas”*

Adapun misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang di ekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat di penuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat di peroleh dengan tetap mengacu pada Misi RPJMD yaitu:

1. Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar kawasan pemukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Wawonii;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis Potensi Daerah;
4. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Pelayanan Publik yang berkualitas;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dan terukur yang akan dicapai. Penetapan sasaran diperlukan untuk penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan tiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 ialah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Sandang, Pangan dan Perumahan), Meningkatnya Peran dan Pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap PMKS serta Meningkatnya Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kab. Konawe Kepulauan membutuhkan dukungan

berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan untuk menunjang Keberhasilan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial adapun kegiatannya yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 7) Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 13) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 15) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 16) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan untuk mencapai sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Peran dan Pelayanan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap PMKS, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran Kegiatan yaitu Tepenuhinya Kebutuhan PMKS (Sandang,pangan dan Perumahan), kegiatannya yaitu:

- 1) Penyediaan Sandang
- 2) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 3) Pemberian Layanan Rujukan
- 4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- 5) Pemberian Layanan Rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk mencapai sasaran Kegiatan yaitu Tepenuhinya Kebutuhan PMKS (Sandang,pangan dan Perumahan), kegiatannya yaitu:

- 1) Penjangkauan Anak-anak Terlantar
- 2) Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 3) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kab
- 4) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
- 5) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk Mencapai sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Bnatuan Sosial Bagi Korban Bencana, kegiatannya yaitu:

- 1) Penyediaan Makanan
- 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung Siaga Bencana
- 3) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan Tata Cara Evaluasi Pengendalian Perencanaan Pembangunan, diamanatkan bahwa masing SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan). Serta Renstra SKPD yang telah disusun berdasarkan Visi, Misi Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2026 dan dengan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Jadi Renstra ini merupakan acuan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai bentuk nyata dari Visi ditetapkanlah Misi Dinas Sosial untuk menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh pernyataan Dinas memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.

Implementasi Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dialokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada dasarnya setiap kegiatan yang ada dalam renstra dilengkapi dengan indikator kinerja. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada setiap Tahunnya sesuai dengan Rencana Menengah Pembangunan Nasional Tahun 2021 -2025. Target kinerja tersebut juga digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian Visi, Misi yang telah ditetapkan. Kinerja kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kerja SKPD yang dibuat setiap tahun dengan harapan bisa dilihat tahapan pencapaian target kinerja dari SKPD bersangkutan pada tahun berjalan. Dengan demikian semua kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan baik secara fisik/keuangan dan pencapaian kinerjanya terukur.

Dilihat dari sudut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disusun pada akhir tahun anggaran dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara transparan.



Langara, Februari 2024

**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Konawe Kepulauan**

H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670510 199412 1 007

					RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								RKA- BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025														
Organisasi : 1.06.01.1 DINAS SOSIAL														
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					SUMBER DANA
									Belanja Operasi	Balanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	06.				DINAS SOSIAL				1.924.627.113	100.000.000	-	-	2.024.627.113	
1	06.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Kab. Konawe Kepulauan	100%	1.485.877.113	100.000.000	-	-	1.485.877.113	
1	06.	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	28.000.000	-	-	-	28.000.000	
1	06.	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	6.500.000				6.500.000	DAU
1	06.	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	6.500.000				6.500.000	DAU
1	06.	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	15.000.000				15.000.000	DAU
1	06.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	739.977.113	-	-	-	739.977.113	
1	06.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	733.477.113				733.477.113	DAU
1	06.	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	6.500.000				6.500.000	DAU
1	06.	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	108.200.000	-	-	-	108.200.000	
1	06.	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	8.200.000				8.200.000	DAU
1	06.	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	100.000.000				100.000.000	DAU
1	06.	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	259.700.000	-	-	-	259.700.000	
1	06.	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	3.000.000				3.000.000	DAU
1	06.	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	1.500.000				1.500.000	DAU
1	06.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	30.000.000				30.000.000	DAU
1	06.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	10.000.000				10.000.000	DAU
1	06.	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	5.200.000				5.200.000	DAU
1	06.	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	10.000.000				10.000.000	DAU

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				SUMBER DANA	
									Belanja Operasi	Balanja Modal	Balanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15
1	06.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	200.000.000				200.000.000	DAU
1	06.	01.	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	-	100.000.000	-	-	100.000.000	
1	06.	01.	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%		100.000.000			100.000.000	DAU
1	06.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	285.000.000	-	-	-	285.000.000	
1	06.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	30.000.000				30.000.000	DAU
1	06.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	12.000.000				12.000.000	DAU
1	06.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	243.000.000				243.000.000	DAU
1	06.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	65.000.000	-	-	-	65.000.000	
1	06.	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	65.000.000				65.000.000	DAU
1	06.	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	-				-	DAU
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Kab. Konawe Kepulauan	100%	60.000.000	-	-	-	60.000.000	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	60.000.000	-	-	-	60.000.000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	30.000.000				30.000.000	DAU
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	30.000.000				30.000.000	DAU
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Kab. Konawe Kepulauan	100%	55.000.000	-	-	-	55.000.000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Kab. Konawe Kepulauan	100%	40.000.000	-	-	-	40.000.000	
1	06	04	2.01	06	Penyediaan Sandang	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	25.000.000				25.000.000	DAU
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	5.000.000				5.000.000	DAU
1	06	04	2.01	08	Pemberian Layanan Rujukan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	10.000.000				10.000.000	DAU
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Kab. Konawe Kepulauan	100%	15.000.000	-	-	-	15.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					SUMBER DANA
									Belanja Operasi	Balanja Modal	Balanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	5.000.000				5.000.000	DAU
1	06	04	2.02	10	Pemberian Layanan Rujukan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	10.000.000				10.000.000	DAU
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Kab. Konawe Kepulauan	100%	202.000.000	-	-	-	202.000.000	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Kab. Konawe Kepulauan	100%	15.000.000	-	-	-	15.000.000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	5.000.000				5.000.000	DAU
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	10.000.000				10.000.000	DAU
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		Kab. Konawe Kepulauan	100%	187.000.000	-	-	-	187.000.000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/kota	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	105.000.000				105.000.000	DAU
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/kota	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	12.000.000				12.000.000	DAU
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	70.000.000				70.000.000	DAU
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Kab. Konawe Kepulauan	100%	121.750.000	-	-	-	85.000.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		Kab. Konawe Kepulauan	100%	36.750.000				36.750.000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	36.750.000				36.750.000	DAU
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		Kab. Konawe Kepulauan	100%	85.000.000	-	-	-	85.000.000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	DAU	Kab. Konawe Kepulauan	100%	85.000.000				85.000.000	DAU
Jumlah								-	1.924.627.113	100.000.000	-	-	2.024.627.113	



LANGARA, 03 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Konawe Kepulauan,

H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
Nip. 19670510 199412 1 007



RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan, merupakan acuan dan arahan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan sektor pertanian yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Penyusunan perencanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan pengejawantahan dari suatu kehendak politik yang ditransformasikan kedalam dokumen pelaksanaan pembangunan yang bersifat pragmatis.

Karena itu dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 disamping memperhatikan aspirasi masyarakat, juga mengacu dan memperhatikan kebijakan jangka menengah dan panjang daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan kebijakan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang serta dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai tersebut diatas, maka pendekatan penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan harus bersifat teknokratik, artinya mengandung obyektivitas, dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan memenuhi aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan dokumen Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dapat dijadikan acuan dalam pembangunan Pertanian, guna mewujudkan Visi SKPD Dinas Pertanian yaitu “Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) Berbasis Lingkaran Hati Emas”.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025, disusun berdasarkan skala prioritas Pembangunan serta Pengembangan Pertanian yang berbasis potensi sumber daya alam, berbasis potensi sumber daya manusia dan berbasis potensi sumber daya buatan seperti Teknologi. Modal Kerja serta manajemen pelaksanaannya yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan Keluarga Tani Sejahtera dengan Pertanian Tangguh yang Berwawasan Agribisnis dan Ramah Lingkungan”.

Langara, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe Kepulauan

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Konawe Kepulauan Dinas Pertanian. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN" around the top and "DINAS PERTANIAN KONAWA KEPULAUAN" around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NAJAMUDIN, S.Pd
Nip. 19760425 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I.	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-Isu Penting Penting Penyelenggran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN.....	12
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional	15
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Pertanian	17
3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN ...	18
BAB V. PENUTUP	19
	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sudah akan menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pemberian kewenangan daerah otonomi tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga daerah otonomi baru diharapkan mampu mengeksplorasi dan mengintegrasikan keunggulan-keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif dan pada akhirnya mampu menciptakan daya saing daerah yang kuat melalui prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda, olehnya itu pengelolaan sumberdaya tersebut idealnya diberikan kepada daerah karena hakikatnya daerah lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Maka sejalan dengan itu, untuk mendukung semakin efektifnya peranan otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), daerah diberi kewenangan yang cukup luas untuk menentukan sendiri kebijakan yang akan ditempuh. Dalam regulasi tersebut telah ditetapkan skala waktu perencanaan pembangunan yang di bagi kedalam 3 (Tiga) skala waktu yakni : 1) Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); 2) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); 3) Perencanaan Pembangunan Tahunan (1 tahun).

Selanjutnya bahwa walaupun Undang-Undang secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam implementasi penyusunan perencanaan pembangunan maka daerah harus memperhatikan perencanaan pembangunann pemerintah pusat, perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya di buat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pelaksanaannya yang akan dimulai dari Tahun Anggaran 2021 sampai Tahun Anggaran 2026.

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan termasuk di antaranya pengambilan keputusan, pikiran dari berbagai alternatif, pemanfaatan dengan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Setiap SKPD Kabupaten Konawe Kepulauan telah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD sejak Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2024 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2024. RENJA Tahun 2024, tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026. RENJA SKPD Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024, antara lain menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pertanian sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan Menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun agar dapat mengoperasionalkan pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan-pelayanan sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Dinas Pertanian, selanjutnya diharapkan untuk mewujudkan Visi Dan Misi pelaksanaan pelayanan publik.

Dengan mengacu dan mendorong pada isu strategis lima tahun kedepan (2021-2026) yakni visi “*Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif Dan Tangguh) Berbasis Lingkaran Hati Emas*” di Kabupaten Konawe Kepulauan, secara umum mengandung arti sebuah keinginan luhur di masa depan untuk menuju tata kehidupan masyarakat Wawonii berkembang, kompetitif dan Tangguh :

- 1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah;

- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Wawonii;
- 3) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Berbasis Potensi Daerah;
- 4) Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik; dan
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan baik, antara lain pelayanan dalam memperlancar hubungan antar kelembagaan daerah, propinsi dan pusat, memperluas koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran proses penyelenggaraan urusan daerah kabupaten Konawe Kepulauan.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan di susun dengan berpedoman berdasarkan kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

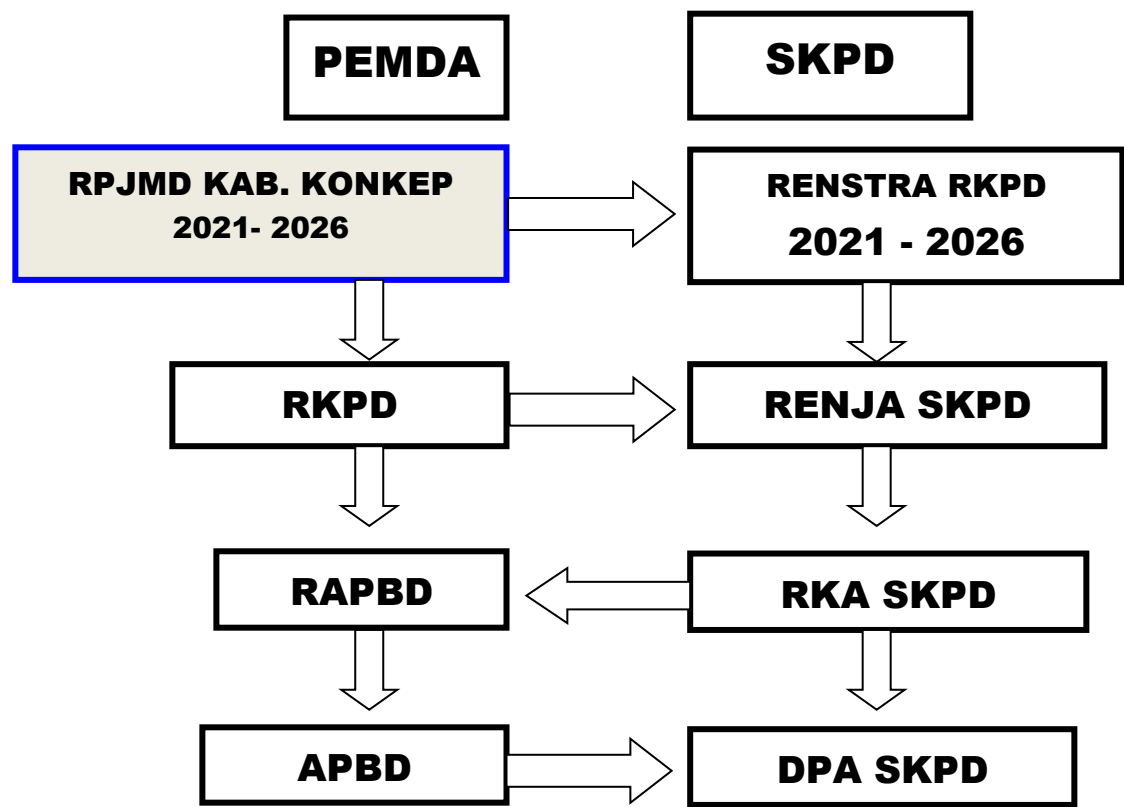
1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) adalah penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui kegiatan tahunan. Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuannya adalah agar kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja SKPD Dinas Pertanian kabupaten Konawe Kepulauan lebih terarah, fokus dan terukur demi terwujudnya mediasi dan koordinasi antar lembaga yang prima dalam rangka mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga dapat segera mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabuapten Konawe Kepulauan yang bermartabat Tahun 2021 - 2026.

Ruang Lingkup Rencana Kinerja (RENJA) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Hubungan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Hubungan Renja Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Rencana kerja SKPD Dinas Pertanian adalah penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari yang dilaksanakan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di tetapkan, yang meliputi : Indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impack)

b. Evaluasi Program Tahun 2021

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2021 terkait dengan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.345.677.655,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.202.506.991,-** dengan persentase sebesar **96,71%**.

c. Evaluasi Program Tahun 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2022 terkait dengan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.062.648.453,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.838.097.930,-** dengan persentase sebesar **95,56%**.

d. Evaluasi Program Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.516.881.936,-** yang terdiri dari (1) belanja pegawai sebesar Rp. 1.213.962.842,- (2) belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.946.313.396,- (3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 75.000.000,- dan (4) Belanja modal sebesar Rp. 281.605.698. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar **Rp. 7.236.789.050,-** dengan persentase realisasi sebesar **96,27%**.

e. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Pertanian mendapat alokasi sebesar **Rp. 5.941.238.400** yang terdiri dari (1) belanja operasi sebesar Rp. 5.229.803.400,- dan (2) belanja modal sebesar Rp. 711.435.000. Adapun realisasi anggaran per 7 Februari 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 64.939.874,- dengan persentase realisasi sebesar **1,09%**. Adapun rincian realisasi Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

No	URAIAN PROG/KEG	URAIAN RINCIAN REKENING		ANGGARAN	REALISASI
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			2,097,057,670.00	64.939.874
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			34,334,400.00	0
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,847,200.00	0
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,570,000.00	0
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,847,200.00	0
		5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,570,000.00	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8,410,000.00	0

		5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,090,000.00	0
3.27.2.0 2	Administrasi Keuangan			1,058,540,950.00	64.939.874
3.27.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.27.01.2 .02.01	Gaji dan Tunjangan ASN	1,052,321,350.00	64.939.874
		5.1.01.01 .01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	511,187,646.00	36.524.700
		5.1.01.01 .01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,809,323.00	8.899.500
		5.1.01.01 .02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	56,594,408.00	3.946.850
		5.1.01.01 .02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21,090,000.00	711.960
		5.1.01.01 .03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95,140,000.00	7.845.000
		5.1.01.01 .04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10,545,000.00	555.000
		5.1.01.01 .05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9,380,000.00	555.000
		5.1.01.01 .06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32,654,480.00	2.534.700
		5.1.01.01 .06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,511,760.00	506.940
		5.1.01.01 .07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2,698,808.00	61.900
		5.1.01.01 .08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,176.00	692
		5.1.01.01 .08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,130.00	38
		5.1.01.01 .09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27,184,364.00	1.954.861
		5.1.01.01 .09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7,125,000.00	406.658
		5.1.01.01 .10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,019,200.00	87.659

		5.1.01.01 .10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	352,887.00	21.360
		5.1.01.01 .11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4,157,564.00	262.979
		5.1.01.01 .11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,058,604.00	64.077
		5.1.01.03 .07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	106,800,000.00	0
3.27.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,649,600.00	0
		5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,570,000.00	0
3.27.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			6,219,600.00	0
3.27.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,649,600.00	0
		5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,570,000.00	0
3.27.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27,646,000.00	0
3.27.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.1.02.01 .01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9,000,000.00	0
3.27.01. 2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,646,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,000,000.00	0
3.27.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			416,774,904.00	0
3.27.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1.02.01 .01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,000,700.00	0
3.27.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	29,734,404.00	0
3.27.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	29,710,800.00	0

3.27.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.1.02.02 .01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,640,000.00	0
3.27.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,840,000.00	0
3.27.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288,649,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,200,000.00	0
3.27.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			386,435,000.00	0
3.27.01. 2.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.2.02.02 .01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350,000,000.00	0
3.27.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.2.02.07 .02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	22,435,000.00	0
		5.2.02.10 .02.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	14,000,000.00	0
3.27.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			37,841,816.00	0
3.27.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.02.01 .01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3,000,000.00	0
3.27.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02 .01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4,966,816.00	0
		5.1.02.02 .01.0063	Belanja Kawat /Faksimili /Internet /TV Berlangganan	4,875,000.00	0
3.27.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.02 .01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25,000,000.00	0
3.27.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129,265,000.00	0
3.27.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.1.02.02 .01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11,265,000.00	0
		5.1.02.03 .02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20,000,000.00	0

		5.1.02.03 .02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38,000,000.00	0
3.27.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.02 .01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30,000,000.00	0
		5.1.02.03 .03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30,000,000.00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			450,742,800.00	0
3.27.02. 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			450,742,800.00	0
3.27.02. 2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.1.02.01 .01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26,407,800.00	0
		5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	319,840,000.00	0
		5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,760,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,400,000.00	0
3.27.02. 2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,335,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000.00	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1,398,335,000.00	0
3.27.03. 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			50,335,000.00	0
3.27.03. 2.01.03	Koordinasi dan Singkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,335,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	10,000,000.00	0

3.27.03. 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			1,348,000,000.00	0
3.27.03. 2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	975,000,000.00	0
3.27.03. 2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48,000,000.00	0
		5.2.04.02 .01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	325,000,000.00	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			344,517,070.00	0
3.27.04. 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			106,100,000.00	0
3.27.04. 2.01.000 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,100,000.00	0
3.27.04. 2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5.1.02.02 .01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15,000,000.00	0
		5.1.02.02 .01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	55,000,000.00	0
3.27.04. 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			238,417,070.00	0
3.27.04. 2.04.000 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,335,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000.00	0
3.27.04. 2.04.000 5	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	5.1.02.01 .01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1,222,500.00	0
		5.1.02.01 .01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat- Obatan Lainnya	45,502,610.00	0
		5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	120,356,960.00	0

		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,000,000.00	0
		5.1.02.05 .02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10,000,000.00	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			49,990,000.00	0
3.27.05. 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			49,990,000.00	0
3.27.05. 2.01.01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49,990,000.00	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1,600,595,860.00	0
3.27.07. 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1,600,595,860.00	0
3.27.07. 2.01.000 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,485,860.00	0
		5.1.02.01 .01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,960,000.00	0
		5.1.02.02 .01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48,000,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,000,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,700,000.00	0
3.27.07. 2.01.000 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5.1.02.02 .01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15,000,000.00	0
		5.1.02.02 .01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	310,000,000.00	0
		5.1.06.03 .01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	650,000,000.00	0
3.27.07. 2.01.000 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5.1.02.01 .01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	179,450,000.00	0

3.27.07. 2.01.000 5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	5.1.02.01 .01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,224,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136,776,000.00	0
		5.1.02.04 .01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,000,000.00	0
JUMLAH				5,941,238,400.00	64.939.874

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Pertanian.

a. Kedudukan

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pertanian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b) Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c) Pengembangan prasarana pertanian;
- d) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f) Pembinaan produksi di bidang pertanian;

- g) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- i) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- l) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

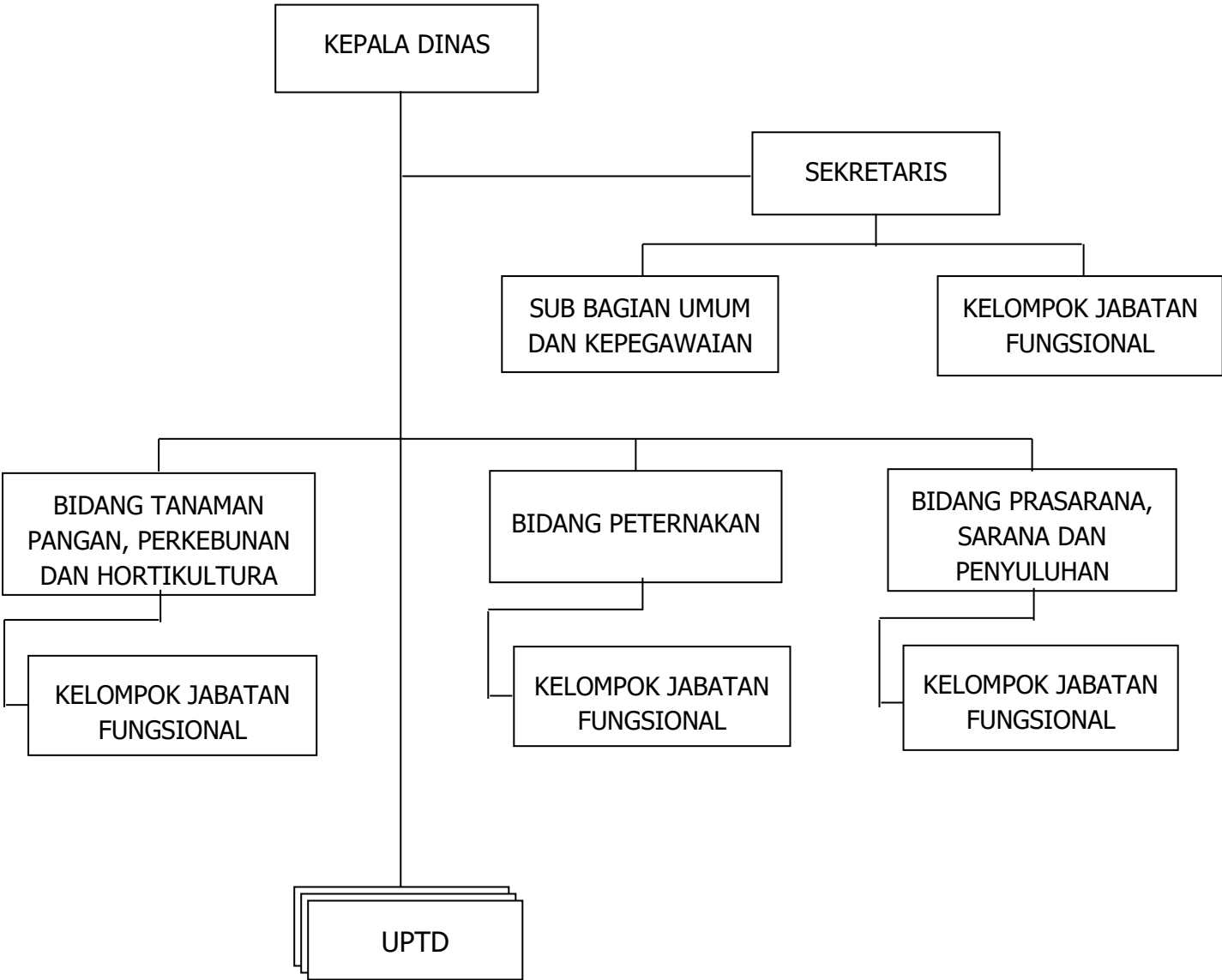
Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan telah ditetapkan bahwa instansi yang menangani pembangunan pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Prasarana, sarana dan penyuluhan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan



e. Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

- dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menjadi petunjuk teknis kepada bawahannya;
 - (6) Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala unit bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala;
 - (8) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau tugas dinas luar daerah, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (9) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

a. Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jml
			PNS	Non PNS	
1	KEPALA DINAS	II-b	1		1
2	SEKRETARIS	III-a	1		1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV-a	1		1
3	BIDANG PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
	Kabid	III-b	1		1
	Jabatan Fungsional		3		3

Kursi kerja non eselon		Unit	30
Kipas angin		Unit	1
Laptop		Unit	7
Komputer		Unit	4
Genset		Unit	7
Meja dan kursi tamu		Set	1
Wairles		Unit	1
Printer Epson L 120		Unit	4
Printer Epson L 1300		Unit	2
Printer Epson L 3210		Unit	2
Aset Gedung Bangunan			
Rumah potong hewan		Unit	1
Balai Pembibitan		Unit	1
Rice Meeling Unit (RMU)		Unit	3
Balai Penyuluhan Pertanian		Unit	7

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2024

Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan, adalah :

1. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan.
3. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, perkebunan, peternakan.
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pelayanan Umum.
5. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.
6. Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparat Dinas Pertanian untuk mendapatkan bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Pertanian. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum menyangkut kepemilikan lahan pertanian sempit, adanya ternak dan berpotensi menular ke manusia (zoonosis), masih lemahnya penguasaan teknologi sektor pertanian, perkebunan, peternakan di tingkat petani/pelaku, dan keterbatasan kepemilikan lahan pertanian, sehingga menyebabkan

intervensi program pertanian mengarah kepada sub sektor pengolahan hasil dan pemasaran.

2.3 Isu-Isu Penting Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-Isu penting dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Lahan

Optimalisasi pemanfaatan lahan belum membudaya dikalangan petani. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya lahan kosong, indek pertanaman yang rendah, belum dimanfaatkannya lahan pekarangan dan sistim budidaya polikultur yang belum banyak diterapkan petani. Kondisi ini selain tidak dapat meningkatkan nilai guna lahan juga dapat menggganggu upaya konservasi lahan.

2. Belum Tercapainya Efisiensi yang Lebih dari Kegiatan Usaha Tani

Pendekatan program yang hanya berorientasi terhadap upaya peningkatan produksi cenderung menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak efisiennya kegiatan usaha tani. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya efisiensi usaha tani yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya keuntungan yang diterima petani.

3. Lemahnya Kelembagaan Petani

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani.

4. Belum Kuatnya Sistem Penyuluhan

Sistem penyuluham pertanian dibangun oleh subsistim sumberdaya personil, subsistim kelembagaan, subsistim sarana dan subsistim metode penyuluhan. Disadari bahwa pada saat ini sistim penyuluhan belum kuat, sehingga belum

mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistim penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompetensi, kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani.

5. Tingginya Kehilangan Hasil Pertanian

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kondisi ini belum termasuk akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan kerusakan akibat bencana alam.

6. Rendahnya Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

7. Masih Lemahnya Permodalan Petani

Salah satu persoalan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah lemahnya permodalan dan akses petani ke lembaga permodalan. Masalah ini cukup serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan penguatan permodalan dan meningkatkan akses petani ke lembaga keuangan, baik di Propinsi maupun di kabupaten/kota.

8. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur serta Prasarana Lahan dan Air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah ketersediaan irigasi. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian tidak mencukupi. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas.

9. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengendalian penyakit hewan lebih diutamakan terhadap pencegahan kejadian dengan melakukan tindakan preventif oleh pemerintah dan masyarakat melalui pengawasan dari unit-unit yang relevan di daerah perbatasan dan unit karantina hewan serta memerlukan koordinasi antar lembaga terkait baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi dan daerah tentagga. Berkembangnya berbagai penyakit yang diperkirakan makin rumit dan beragam, sangat diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan medik terhadap ternak yang ada.

2.4 Reviu Terhadap rancangan Awal RKPD

KODE					Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 00)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	569,160,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	1.678.000.000
3	27	02	2.01	0002	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	50,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	1000,000,000

3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	50.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	100.000.000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Lingkup SKPD	-	-		Pembangunan Prasarana Pertanian	Lingkup SKPD	-	-	599.300.000
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	72.100.000

3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	102.000.000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Lingkup SKPD	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Lingkup SKPD	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	100.000.000
							Jumlah Pembinaan Unit Usaha Hewan	12 Laporan				Jumlah Pembinaan Unit Usaha Hewan	12 Laporan	655.000.000
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Lingkup SKPD	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	300.000.000

3	27	05			Program Penyuluhan Pertanian					Program Penyuluhan Pertanian				
3	27	05	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Lingkup SKPD	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	525.000.00 0
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	426.000.00 0
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	44.799.600
3	-	-			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lingkup SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	447.640.00 0

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	134.828.40 0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	96.292.000
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.751.600
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	66.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	151.520.04 4

					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	3 Unit	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokume n		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat didasarkan pada usulan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa dan kecamatan. Usulan program kegiatan pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tenggara pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Bibit Pala;
2. Pengadaan Bibit Durian;
3. Pengadaan Pupuk;
4. Pengadaan Bibit Sayuran;
5. Pengadaan Herbisida;
6. Pengadaan Pesticida;
7. Pengadaan Bibit Sapi;
8. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Sapi;
9. Pengadaan Rens Sapi;
10. Bantuan Ternak itik Petelur;
11. Pengadaan Mesin Perontok Padi;
12. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput;
13. Pengadaan Penggilingan padi;
14. Pembangunan Gedung RMU;
15. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier;
16. Pengadaan Bibit Nilam;
17. Pengadaan Ayam Kampung
18. Pengadaan Pupuk Cair;
19. Pengadaan Pupuk Padat;
20. Pengadaan Bibit Cengkeh; dan
21. Pengadaan Bibit Mangga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat ditanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 di Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan struktur Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan mempergunakan pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan adanya pembagian peran dan tanggung jawab sehingga terlaksana mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Pertanian

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Pertanian Nasional dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan maka pembangunan sektor Pertanian di Kabupaten Konawe Kepulauan pada hakekatnya juga diarahkan untuk mengembangkan struktur ekonomi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan penduduk dalam bidang agribisnis dan agroindustri serta kesempatan kerja. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Perekonomian Daerah”

Di dalam pembangunan, sektor tanaman pangan mempunyai posisi yang strategi dan penting. Peranan sektor ini adalah penghasil makanan pokok dimana saat ini ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Oleh karena itu untuk mewujudkan, memulihkan dan mempertahankan ketahanan pangan diperlukan suatu perencanaan di bidang tanaman pangan dan peternakan sejalan dengan perkembangan pembangunan pertanian, tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan suatu konsep yang dapat menyikapi perubahan secara proaktif dalam bentuk Rencana Strategis.

Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada kegiatan-kegiatan di masa mendatang dan dibuatnya program dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap perkembangan dan perubahan yang mungkin timbul dengan demikian program-program yang dibuat dapat secara nyata memberikan kontribusi kepada daerah/wilayah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Adapun sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan”

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategisnya	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan Kontribusi Tanaman Pangan terhadap PDRB Sektor Pertanian	%	1	1,5	3	3,5	4	5
		Pertumbuhan Kontribusi Perkebunan terhadap PDRB Pertanian	%	1	1,2	1,5	1,9	2,4	3,5
		Pertumbuhan Kontribusi Peternakan terhadap PDRB Pertanian	%	1	1,1	1,3	1,5	1,7	2,4

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi dan validasi. Adapun program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025

KODE REKENING				PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan
3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian

3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Hewan
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Untuk mempercepat Implementasi pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mendukung proses pembangunan daerah diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, maka disusunlah berbagai program prioritas yang akan dilaksanakan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2025 yaitu:

Tabel. 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2025

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		7,000,650,784
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2,298,451,184
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		49,751,600
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,417,200
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	9,417,200
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,417,200
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,500,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan		1,268,125,940
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,261,708,740

3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6,417,200
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		6,417,200
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,417,200
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		72,876,000
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12,000,000
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti DIKLAT	60,876,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		447,640,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,000,000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35,000,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35,000,000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,640,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		134,828,400
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang disediakan	98,828,400
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36,000,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96,292,000
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25,292,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,000,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		222,520,044
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	151,520,044
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71,000,000

3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1,778,000,000
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1,778,000,000
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,678,000,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		699,300,000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian		100,000,000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		599,300,000
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Dibangun	199,650,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Dibangun	199,650,000

3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun	200,000,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		929,100,000
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		72,100,000
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	72,100,000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		102,000,000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	102,000,000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Hewan		755,000,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100,000,000
3	27	04	2.04	05	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pembinaan Unit Usaha Hewan	655,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		300,000,000

3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		300,000,000
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura yang Dikendalikan	300,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		995,799,600
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		995,799,600
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	525,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	426,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	44,799,600
JUMLAH							7,000,650,784

BAB V.

P E N U T U P.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021-2026.

Renja Tahun 2025 ini telah mengacu pada restrukturisasi program dan kegiatan, dimana target yang akan dicapai telah dirumuskan sebagai sebuah indikator kinerja, demikian pula pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Dengan demikian, upaya ini dapat dipahami dan dipatuhi sebagai bagian dari reformasi perencanaan, yang secara langsung menentukan sumbangannya dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan.

Diharapkan melalui penanganan yang simultan dan terpadu oleh semua unsur terkait disemua tingkatan maka pencapaian sasaran program pertanian dapat terwujud guna mendukung upaya pembangunan pertanian berbasis dipedesaan dan berwawasan agribisnis.

Pada akhirnya, diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembangunan pertanian dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi pembangunan daerah, pembangunan nasional, membantu menyelesaikan permasalahan secara langsung terhadap pembangunan pertanian dan meningkatkan peran dan fungsi pertanian sebagai salah satu anugerah dalam meningkatkan peradaban umat manusia.

Langara, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe Kepulauan


NAJAMUDIN, S.Pd
Nip. 19760425 200604 1 006

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam tahapan perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk memenuhi Rencana Kerja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 ini, oleh sebab itu mohon kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait.

Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini.

Langara, Mei 2024
Kepala Dinas Perikanan,


ILHAM, S.Pi., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19770412 200901 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematikan Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	16
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN	22
BAB V. P E N U T U P	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENJA disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan hasil evaluasi RENJA perangkat daerah Tahun Berjalan (2024). Berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dan Renstra. Sedang berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu (2023) dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan (2024) bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

3. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024.
12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 32 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan ini adalah :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA Dinas Perikanan kedalam Program/Kegiatan tahunan;
2. Menjadi bahan musrenbang baik tingkat kecamatan maupun kabupaten;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Perikanan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN, menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai reapiulasin jumlah program dan jumlah kegiatan.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN
Berisi tentang Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif
- BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Catatan Ketersediaan Anggaran, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
 2. Tujuan yang dikehendaki;
 3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
 4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya
- Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut:
1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2023 dapat di uraikan pada Tabel 2.1 berikut :

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 ditargetkan Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap mencapai 12% dari nilai produksi tahun 2022 dan terealisasi 6,5%. Pencapaian target program ini ditunjang dengan kegiatan utama yaitu pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten/kota. Capaian kegiatan pemberdayaan Nelayan Kecil Kab/kota yaitu peningkatan kapasitas nelayan dengan pengenalan teknologi, penguatan kelembagaan nelayan, perawatan kapal dengan fiberkasi yang menjangkau 49 KUB Nelayan yang tersebar di 7 Kecamatan.
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2023 ditargetkan pertumbuhan produktifitas 20% dan terealisasi sebesar 43%. Hal ini terlihat pada produksi perikanan budidaya tahun sebelumnya (2022) sebesar 20,41 ton dan capaian produksi tahun 2023 sebesar 29,17 ton. Dengan demikian pertumbuhan produktifitas produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 43 %. Dalam mencapai target tersebut, program pengelolaan perikanan budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan utama yaitu kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Capaian kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yaitu pembinaan kepada 21 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di lima kecamatan. Sedangkan capaian kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan berupa paket percontohan budidaya bandeng dengan pola diseminasi teknologi pada lokasi yaitu Desa Munse Indah dan Lapulu Kec. Wawonii Timur.
 - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator angka ilegal fishing (1/1000). Program ini ditargetkan menurunkan angka ilegal fishing sebesar 4,43 dan tercapai sebesar 4,59. Dari jumlah nelayan kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 2.614 orang, diduga masih melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai peraturan (bom) sebanyak 16 Orang. Capaian Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ditunjang dengan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dengan pola sosialisasi peraturan perundang undangan

di Kecamatan Wawonii Barat dan pola kunjungan ke desa-desa pesisir yang diduga sebagai asal pelaku ilegal fishing.

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator pertumbuhan industri skala mikro dalam industri pengolahan ditargetkan 15%. Capaian program ini adalah sebesar 2%, Hal ini dapat dilihat dari jumlah Produksi pengolahan ikan skala mikro di tahun 2022 sebanyak 384 Ton dan ditahun 2023 menjadi 392 Ton, sehingga terjadi peningkatan sebesar 2%. Dalam pencapaian target ini, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ditunjang dengan dua kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan indikator Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Meningkatkan Kompetensinya dan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan indikator meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

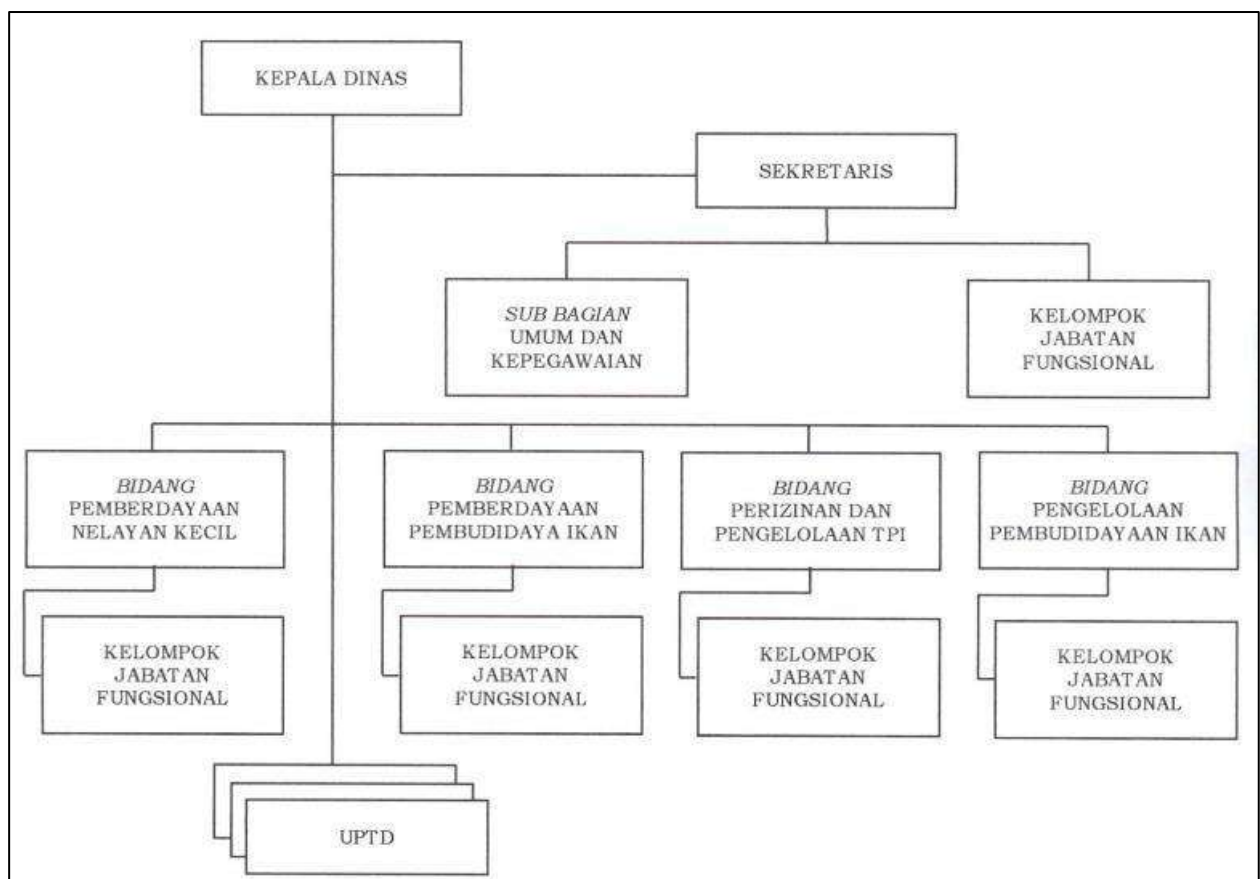
Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas,
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagai berikut :



Setiap unsur dan bidang dari susunan organisasi Dinas Perikanan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan program dan anggaran dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepagawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil melalui diklat, iptek dan informasi nelayan kecil serta pembinaan usaha dan kelembagaan nelayan kecil. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas, bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengemabangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemberdayaan nelayan kecil;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek, dan informasi nelayan kecil;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan usaha dan kelembagaan usaha nelayan kecil;
- e. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan nelayan kecil;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil;
- g. Pelaksnaaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanan tugas pada bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Bidang pemberdayaan pembudidaya ikan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun, memnyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan dalam melaksanakan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan. Bidang pemberdayaan pembudidaya ikan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pemberdayaan pembudidaya ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada pemberdayaan pembudidaya ikan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pemberdayaan pembudidaya ikan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi bidang pemberdayaan pembudidaya ikan dalam melaksanakan diklat, iptek, dan informasi pembudidaya ikan serta pembinaan usaha dan kelembagaan pembudidaya ikan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan dan pembinaan usaha kelembagaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.
- h. Pengevaluasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan pembudidaya ikan dalam menyeleggar]kan diklat, iptek dan informasi pembudidaya ikan serta pembinaan usaha kelembagaan pembudidaya ikan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kinerja dilingkungan bidang pemberdayaan pembudidaya ikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sesuai akuntabilitas kinerja; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pemberdayaan pembudidaya ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kegiatan serta memberikan rekomendasi

penerbitan surat izin usaha perikanan, usaha pembudidayaan ikan dan penyelenggaraan pengawasan. Bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. Perumusan kebijakan di bidang perizinan pembudidayaan ikan, pengelolaan, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- e. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- f. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- g. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Perikanan;
- h. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasaran hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang perizinan dan pengelolaan TPI;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan, kegiatan dibidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;
- l. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dengan cara membandingkan

antar rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang perizinan dan pengelolaan TPI sesuai dengan tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perizinan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan dan pembudidayaan ikan. Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengelolaan pembudidayaan ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembudidayaan ikan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan
Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (%)					Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)		Catatan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap (%)		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	10	11	12	13	14	10,2	12,7	12	13	14	
2	Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	5	10	15	20	30	4,3	-64,8	43	20	30	
3	Pertumbuhan skala mikro dalam industri pengolahan ikan (%)		Meningkatnya pertumbuhan skala mikro industri pengolahan ikan	5	10	15	20	25	5	5	15	20	25	
4	Angka ilegal fishing 1/1000		Menurunnya angka ilegal fishing	7,23	6,53	4,43	2,33	1,63	6,5	6,12	4,59	2,67	1,63	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Isu - isu strategis yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan yang dihadapi dalam rangka Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain adalah:

1. Belum tersedianya Tempat Pelelangan Ikan dan tidak berfungsinya pabrik Es
2. Pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang belum optimal karena masih menggunakan teknologi konvensional;
3. Ketersediaan armada penangkapan yang bisa menjangkau fishing terbatas;
4. Rendahnya produktivitas Nelayan;
5. Masih maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
6. Pengembangan produksi budidaya belum maksimal; dan
7. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perikanan merupakan satu unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dengan demikian dinas perikanan melaksanakan fungsi teknis dibidang perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dan pokok pikiran DPRD hasil usulan masyarakat melalui reses didapatkan beberapa program/kegiatan yang disepakati dan menjadi prioritas. Program/kegiatan seperti tersaji pada tabel berikut :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Musrenbang				
1	Mesin katinting	Desa Palingi	Tersedianya mesin perahu	15 Unit	Disiapkan CPCL
2	Bantuan Bibit Lobster, Kerapu, Ikan Kakap	Desa Langara Tanjung Batu	Tersedianya bibit ikan	10 Kelompok	Disiapkan CPCL
3	Pengadaan Kapal Pemburu Ikan	Desa Tangkombuno	Tersedianya kapal pemburu ikan	4 Unit	Disiapkan CPCL
4	Pengadaan Ketinting	Desa Bangun Mekar	Tersedianya mesin perahu	30 Unit	Disiapkan CPCL
5	Perahu Nelayan Gt 3	Desa Tombaone	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
6	Perahu Nelayan Gt 3	Desa Mawa	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
7	Perahu Nelayan Gt 3	Desa Mata Buranga	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL

8	Pengadaan Alat Jaring Ikat/Pukat	Desa Mataiwoi	Tersedianya Pukat	10 Unit	Disiapkan CPCL
9	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Wakadawu	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
10	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Nanga	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
11	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Tepolawa	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
12	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Butuea	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
13	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Wawouso	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
14	Pengadaan Prasarana Perikanan	Desa Lawey	Tersedia Perahu	4 unit	Disiapkan CPCL
15	Pengadaan Alat Jaring Ikat/Pukat	Desa Wawobili	Tersedianya Pukat	10 Unit	Disiapkan CPCL
16	Bantuan perahu Fiber dan mesin	Desa Langara Bajo	Tersedianya Perahu	4 Unit	Disiapkan CPCL
17	Pengadaan alat tangkap ikan/pukat	Desa Mata Langara	Tersedianya Perahu	10 Unit	Disiapkan CPCL
	Pokir				
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Desa Tepolawa	Tersedianya Perahu	4 Unit	Disiapkan CPCL
19	Pengadaan Perahu Piber	Desa Rawa Indah	Tersedianya Perahu	4 Unit	Disiapkan CPCL
20	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Desa Lamoluo	Tersedianya Pukat	10 Unit	Disiapkan CPCL
21	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Kelurahan Langara Laut	Tersedianya Pukat	10 Unit	Disiapkan CPCL
22	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Desa Nambo Jaya	Tersedianya Pancing	10 Unit	Disiapkan CPCL
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Desa Mata Langara dan Langara Iwawo	Tersedianya Perahu	4 Unit	Disiapkan CPCL
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan	Desa Bahaba	Tersedianya Perahu	4 Unit	Disiapkan CPCL

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020-2025 yaitu : 1) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; 3) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berbagai strategi sebagai berikut : 1) Pemberantasan IUU Fishing, destructive fishing, & Karantina Ikan; 2) Peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; 3) Penguatan daya saing industri perikanan; 3) Pengembangan Sumber Daya Kelautan; 4) Pengembangan Sumber Daya Kelautan; 5) Peningkatan kesejahteraan stakeholders KP; dan 6) Penguatan daya saing SDM, Inovasi Teknologi & Riset.

Strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan secara nasional dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemberantasan IUU Fishing, destructive fishing, & Karantina Ikan :
 - a. Penegakan hukum dan HAM Perikanan;
 - b. Penguatan kelembagaan, SDM & sarpras pengawasan, termasuk pemberdayaan POKMASWAS;
 - c. Penyadartahuan masyarakat akan destructive fishing; dan
 - d. Penguatan sistem karantina ikan
2. Peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; 3) Penguatan daya saing industri perikanan :
 - a. Optimalisasi produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. Pengelolaan 11 WPP;
 - c. Konservasi & keanekaragaman hayati;
 - d. Peningkatan usaha dan minat investasi;
 - e. Zonasi, tata ruang laut & batas maritim;
 - f. Pengelolaan PUD dan perairan tawar;
 - g. Pengendalian sampah laut dan pencemaran laut; dan
 - h. Penyediaan sarpras perikanan.

3. Pengembangan Sumber Daya Kelautan :
 - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan;
 - b. Standardisasi mutu, sertifikasi dan kepatuhan;
 - c. Pembangunan Sistem Rantai Dingin (SRD) dan sistem logistik;
 - d. Peningkatan akses pasar termasuk penurunan hambatan tarif dan nontarif;
 - e. Branding produk; dan
 - f. Peningkatan Konsumsi Ikan.
4. Pengembangan Sumber Daya Kelautan :
 - a. Pengembangan industri dan jasa kelautan (garam, biofarmakologi, jasa kelautan, investasi PPK dan PPKT, pembangunan SKPT, energi terbarukan);
 - b. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
5. Peningkatan kesejahteraan stakeholders KP :
 - a. Penguatan kelembagaan pelaku usaha;
 - b. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. Pengembangan kewirausahaan; dan
 - d. Perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan dann penguatan kelembagaan LPUMKP.
6. Penguatan daya saing SDM, Inovasi Teknologi & Riset :
 - a. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Nonaparatur (termasuk tenaga pengajar);
 - b. Penguatan link and match pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
 - c. Hilirisasi hasil inovasi dan riset DUDI dan Masyarakat;
 - d. Penumbuhan budaya maritim; dan
 - e. Penyediaan sarpras diklatluh & riset.

B. Telaahan Kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan dijabarkan dengan beberapa strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

1. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alamsecara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;

2. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
3. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
4. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
5. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Pada rencana kerja dinas perikanan tahun 2025, Dinas perikanan akan berkontribusi pada peningkatan PDRB Konawe Kepulauan khususnya PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan meningkatkan Produktivitas dan daya saing sektor- sektor perekonomian daerah dengan indikator produksi perikanan. Dinas Per Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan

No.	TUJUAN	SASARAN	Target 2025
1	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	14%
		Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	25%
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi produksi Perikanan	15%
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan perikanan	1,63 perseribu

DINAS PERIKANAN

Tahun 2025, Dinas Perikanan menargetkan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) sebesar 9.100 Ton dengan rincian produksi perikanan tangkap 8.665 Ton, budidaya 40 Ton dan pengolahan hasil perikanan 395 Ton.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kebijakan Prioritas Kabupaten Konawe Kepulauan dan tema pembangunan tahun 2025 “Sinergitas Pembangunan ekonomi sosial dan budaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dan yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pada Tahun 2025 Dinas Perikanan merencanakan untuk dapat melaksanakan 4 Program utama dan 1 satu Program penunjang yang terurai kedalam 9 (Sembilan) Kegiatan Prioritas dan 8 (delapan) kegiatan Penunjang. Dari rencana Program dan Kegiatan tahun 2025 tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp. 5.241.245.303. Program dan Kegiatan Prioritas tersebut tersaji pada tabel terlampir:

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Konawe Kepulauan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan kabupaten Konawe Kepulauan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Langara, Mei 2024
Kepala Dinas Perikanan,



ILHAM, S.Pi., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19770412 200901 1 010

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PERKIRAAN MAJU RENCANA 2026			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
1					2		3		4	5	6	7	8	9
3	25				KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.241.422.785				5.241.422.785
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang		100		2.283.122.785				2.283.122.785
3	25	01	02.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Konawe Kepulauan			49.000.000				49.000.000
3	25	01	02.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Konawe Kepulauan	2		25.000.000	DAU			25.000.000
3	25	01	02.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1		4.500.000	DAU			4.500.000
3	25	01	02.1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1		4.500.000	DAU			4.500.000
3	25	01	02.1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Konawe Kepulauan	2		15.000.000	DAU			15.000.000
3	25	01	02.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Konawe Kepulauan			1.361.772.785				1.361.772.785
3	25	01	02.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bulan)	Konawe Kepulauan	16		1.354.272.785	DAU			1.354.272.785
3	25	01	02.2	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Konawe Kepulauan	1		7.500.000	DAU			7.500.000
3	25	01	02.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Konawe Kepulauan			7.000.000				7.000.000
3	25	01	02.3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1		1.000.000	DAU			1.000.000
3	25	01	02.3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1		6.000.000	DAU			6.000.000
3	25	01	02.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Konawe Kepulauan			75.600.000				75.600.000
3	25	01	02.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Konawe Kepulauan	37		25.600.000	DAU			25.600.000
3	25	01	02.5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Konawe Kepulauan	4		50.000.000	DAU			50.000.000
3	25	01	02.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Konawe Kepulauan			377.500.000				377.500.000
3	25	01	02.6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Konawe Kepulauan	1		7.000.000	DAU			7.000.000
3	25	01	02.6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Konawe Kepulauan	5		5.000.000	DAU			5.000.000
3	25	01	02.6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Konawe Kepulauan	1		20.000.000	DAU			20.000.000
3	25	01	02.6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Konawe Kepulauan	1		20.000.000	DAU			20.000.000
3	25	01	02.6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Konawe Kepulauan	3		5.500.000	DAU			5.500.000
3	25	01	02.6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Konawe Kepulauan	1		20.000.000	DAU			20.000.000
3	25	01	02.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Konawe Kepulauan	100		300.000.000	DAU			300.000.000
3	25	01	02.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Konawe Kepulauan			30.000.000				30.000.000

3	25	01	02.7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Konawe Kepulauan	3	30.000.000	DAU		30.000.000
3	25	01	02.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Konawe Kepulauan		146.250.000			146.250.000
3	25	01	02.8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Konawe Kepulauan	1	2.250.000	DAU		2.250.000
3	25	01	02.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Konawe Kepulauan	12	30.000.000	DAU		30.000.000
3	25	01	02.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Konawe Kepulauan	1	114.000.000	DAU		114.000.000
3	25	01	02.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Konawe Kepulauan		236.000.000			236.000.000
3	25	01	02.9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Konawe Kepulauan	16	170.000.000	DAU		170.000.000
3	25	01	02.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Konawe Kepulauan	3	66.000.000	DAU		66.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap (%)		14%	1.193.300.000			1.193.300.000
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Konawe Kepulauan		280.000.000			280.000.000
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Konawe Kepulauan	1	150.000.000	DAU		150.000.000
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Konawe Kepulauan	25	30.000.000			30.000.000
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Konawe Kepulauan	100	100.000.000			100.000.000
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Konawe Kepulauan		905.000.000			905.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya (Org)	Konawe Kepulauan	130	220.000.000	DAU		220.000.000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanya (Kelompok)	Konawe Kepulauan	40	170.000.000	DAU		170.000.000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Pembiayaan Kemitraan Usaha	Konawe Kepulauan	12	15.000.000			15.000.000
3	25	03	2.02	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Pemberdayaan Nelayan Kecil	Konawe Kepulauan	10	500.000.000			500.000.000
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				8.300.000			8.300.000
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1	8.300.000			8.300.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya (%)		30%	1.225.000.000			1.225.000.000
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 Satu Daerah Kab/Kota		Konawe Kepulauan		60.000.000			60.000.000
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam satu Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Intensif Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam satu Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Intensif Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Konawe Kepulauan	1	30.000.000	DAU		30.000.000
3	25	04	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam satu Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Intensif Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam satu Kab/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, Intensif Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Konawe Kepulauan	1	30.000.000	DAU		30.000.000

3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan		Konawe Kepulauan		440.000.000			440.000.000
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Konawe Kepulauan	7	150.000.000	DAU		150.000.000
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil Yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Konawe Kepulauan	12	55.000.000	DAU		55.000.000
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang Terfalitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	Konawe Kepulauan	28	35.000.000			35.000.000
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan Kemudahan akses Pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kelompok)	Konawe Kepulauan	12	200.000.000	DAU		200.000.000
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Konawe Kepulauan		50.000.000			50.000.000
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidaya Ikan Kecil dalam 1 Daerah Kab/Kota		1	25.000.000			
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidaya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota		5	25.000.000			
3	25	04	2.03		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Konawe Kepulauan		675.000.000			675.000.000
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1	20.000.000	DAU		20.000.000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Konawe Kepulauan	1	200.000.000	DAU		200.000.000

3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Konawe Kepulauan	1	20.000.000	DAU		20.000.000
3	25	04	2.04	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan yang Tersedia	Konawe Kepulauan	1	300.000.000	DAU		300.000.000
3	25	04	2.04	10	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang mendapatkan pemantauan dan pembinaan	Konawe Kepulauan	3	35.000.000	DAU		35.000.000
3	25	04	2.04	11	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Rekomendasi Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Konawe Kepulauan	1	100.000.000	DAU		100.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Angka Illegal Fishing (1/1000)		1,63	260.000.000			260.000.000
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Konawe Kepulauan		260.000.000			260.000.000
3	25	05	2.01	04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1	50.000.000	DAU		50.000.000
3	25	05	2.01	07	Pengawasan usaha Penangkapan ikan dan/atau usaha sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1	210.000.000	DAU		210.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Industri Skala Mikro dalam Industri Pengolahan		25%	280.000.000	DAU		280.000.000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Konawe Kepulauan		50.000.000			50.000.000
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	Konawe Kepulauan	1	50.000.000	DAU		50.000.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Konawe Kepulauan		200.000.000			200.000.000
3	25	06	2.02	01	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit)	Konawe Kepulauan	5	200.000.000	DAU		200.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Konawe Kepulauan		30.000.000			30.000.000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Konawe Kepulauan	15	30.000.000	DAU		30.000.000
					TOTAL JUMLAH				5.241.422.785			5.241.422.785

RENJA SKPD

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2025 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun pada Renstra 5 Tahun sebelumnya , peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran belum terlaksana dengan optimal. Pada Rencana Kerja tahun 2025 ini akan dilaksanakan semaksimal dan seoptimal mungkin untuk mencapai target Renstra 2021-2026 dan RPJMD 2021-2026 secara berkesinambungan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan dasar dalam menentukan program dan kegiatan rencana satu tahun kedepan guna lebih mengerahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawakan semua kebijakan, program, dan sasaran serta kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang demi tercapainya tujuan dan sasaran secara maksimal.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Langara, Mei 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	1
----------------------	---

DAFTAR ISI	2
------------------	---

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rensra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo.....	11
2.4 Review Rancangan Awal Tahun 2023	13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 	19
3.3 Program dan Kegiatan 	21

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rancana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 12 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman bagi Kerja Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Dengan tujuan untuk mewujudkan program/kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati/ Wakil Kabupate Konawe Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan.

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023, Menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan.
- BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rensra

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Kominfo Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 terdiri 5 (lima) program yakni Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Pelaksanaan Program kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran 2023 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 98.31%.

Tabel 1

Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		Capaian (%)
		Alokasi Anggaran	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.738.109.004	2.669.710.639	97,50
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.600.523.100	1.600.324.999	99,99
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	357.080.000	356.440.000	99,82
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.617.370	82.353.370	87,97
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	65.948.300	64.452.500	97,73
JUMLAH		4.855.277.774	4.773.281.508	98,31

Meskipun anggaran dapat terealisasi dengan baik, namun yang menjadi penilaian utama dalam pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah haruslah mengacu pada target renstra perangkat daerah. Dimana dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan tidak dapat memenuhi target capaian rencana strategis yang telah ditetapkan. Adapun target dan realisasi capaian indikator utama ditahun 2023 yang tertuang dalam LAKIP 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo dan Persandian Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kinerja T.A. 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui jaringan telekomunikasi	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan komunikasi	90%	100%	100 %
2.	Meningkatnya data statistik yang terintegrasi	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	75%	0%	0%
3.	Meningkatnya penggunaan persandian oleh perangkat daerah	Indeks kematangan keamanan informasi perangkat Daerah	100%	0%	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah mengakomodir jaringan internet lingkup pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Adapun indeks kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2023 masih dalam predikat cukup dengan nilai indeks 1,94. Olehnya itu, penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan, baik didomain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun layanan SPBE. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 (lima) sub kegiatan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan 2 (dua) sub kegiatan
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan
- c. Program Aplikasi Informatika
1. ` Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan
 2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan

Tabel 3
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		ANGGARAN (Rp.)			Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
						Target	Rp.	Realisasi kinerja	Rp.	%			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Strategi; Peningkatan kualitas infrastruktur dan keterhubungan antar kawasan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	2.738.109.004	100	2.669.710.639	97,50	100,00	-	-
2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80,00	1.600.523.100	87,13	1.600.324.999	99,99	100,00	Operator teknis bidang komunikasi belum memiliki keahlian yang memadai	Pelatihan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	80,00	357.080.000	80,49	356.440.000	99,82	100,00	- Jaringan optik yang ada hanya terbatas pada lingkup OPD, belum mencakup wilayah kecamatan.	- Pembangunan jaringan fiber optik untuk jaringan backbone lingkar Wawonii
				Persentase ruang publik yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	66,67		66,67			100,00	- Belum memadainya fasilitas gedung kantor - Belum adanya SDM teknis jaringan dan aplikasi	- Perluasan bangunan gedung kantor - Perekrutan tenaga teknis

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah	Strategi/Arah Kebijakan	Uraian Program	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		ANGGARAN (Rp.)			Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah
						Target	Rp.	Realisasi kinerja	Rp.	%			
4	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Buku Profil Daerah	Tersedia/ Tidak	<i>Tersedia</i>	93.617.370	Tersedia	82.353.370	87,97	<i>Tersedia</i>	<i>Masih kurangnya data OPD yang terangkum dalam Buku Profil Daerah</i>	Peningkatan penyediaan data OPD melalui forum satu data
5	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang informasinya teramankan	%	64,28	65.948.300	34,09	64.452.500	97,73	53,03	<i>Belum tersedianya tenaga teknis bidang persandian</i>	Perekrutan tenaga teknis
JUMLAH 5 (LIMA) PROGRAM							4.855.277.774		4.773.281.508	98,31			

2.3 Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 jelas belum dapat memenuhi semua target capaian renstra dalam pelaksanaannya. Kesesuaian visi misi RPJMD 2021-2026 haruslah menjadi perhatian untuk mewujudkan visi Renstra Kominfo 2021-2026. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi isu penting sebagai permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Minimnya infrastruktur TIK

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan akses internet public yang berkualitas, ketersediaan jaringan intranet pemerintah daerah, pusat data pemerintah daerah yang teramankan serta pelayanan public yang terintegrasi. Meskipun anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan mampu memenuhi sebahagian target dalam RPJMD namun untuk menjadi perhatian bahwa membangun system informasi yang terintegrasi tidaklah hanya mencakup ketersediaan internet antar OPD dinas/bagian saja tetapi juga harus merambat ke tingkat perdesaan. Selain itu, kualitas intra jaringan pemerintah daerah harus didukung oleh sarana dan parasarana yang memadai.

2. Belum adanya standar baku pengelolaan system informasi dan masih kurangnya Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara utuh.

3. Kurangnya SDM teknis

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, tidak hanya diperlukan anggaran yang memadai tetapi juga sumber daya manusia yang memadai untuk pengelolaannya.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian:

1. Peningkatan Konektivitas Jaringan Komunikasi dan Informasi melalui Infrastruktur TIK yang memadai

2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

3. Penyediaan Data Statistik yang Terintegrasi

Tersedianya data pemerintah daerah dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

4. Keterbukaan Informasi dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Selain itu, Keamanan informasi juga menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

2.4 Review Rancangan Awal Tahun 2023

Tabel 4
Reviuw Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah	Uraian Program/Kegiatan	KINERJA	INDIKATOR	Target Indikator	Realisasi	Rincian Kegiatan	ANGGARAN (Rp.)		
							Pagu	Realisasi	Persen Realisasi (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	- Penyusunan dokumen renja - Perjalanan dinas Rapat dan Konsultasi	49.887.720	49.618.801	99,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	- Penyusunan LAKIP - Perjalanan dinas	5.982.480	5.736.000	95,88
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	- Penyusunan LPPD - Perjalanan dinas	6.534.575	6.366.500	97,43
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 orang / bulan	10 orang/ bulan	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Honorarium penatausahaan keuangan	1.042.722.843	977.468.791	93,74

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.490.310	6.454.500	99,45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	- Penyediaan pakaian batik khas konkep - Penyediaan pakaian olahraga SKPD	9.550.000	9.540.000	99,90
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2 orang	- Pelaksanaan bimtek ASN	25.932.000	25.343.669	97,73
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	- Pemeliharaan/penyediaan komponen listrik kantor	996.270	970.000	97,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	- Penyediaan ATK kantor	18.230.000	18.191.989	99,79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.600.000	10.261.080	96,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	4 dokumen	- Langganan Media Cetak	5.040.000	4.980.000	98,81
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	- Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	358.482.000	358.323.659	99,96

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	<i>- Pengadaan motor</i>	<i>23.353.000</i>	<i>23.300.000</i>	<i>99,77</i>
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>4 unit</i>	<i>- Pengadaan laptop dan printer</i>	<i>56.898.400</i>	<i>56.898.400</i>	<i>100,00</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>- Penyediaan materai kantor</i>	<i>3.690.000</i>	<i>3.690.000</i>	<i>100,00</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	<i>- Langganan Listrik Kantor - Penyediaan bandwidht pemkab. - Izin siaran radio HT</i>	<i>1.010.651.746</i>	<i>1.010.279.250</i>	<i>99,96</i>
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>- Penyelenggaraan rapat kantor</i>	<i>14.756.000</i>	<i>14.520.000</i>	<i>98,40</i>
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>- Penyediaan jasa supir kepala OPD</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>100,00</i>
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>6 unit</i>	<i>6 unit</i>	<i>- Pembayaran pajak kendaraan dinas - Pemeliharaan kendaraan dinas</i>	<i>58.311.660</i>	<i>57.768.000</i>	<i>99,07</i>
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	<i>- Pemeliharaan gedung kantor</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>100,00</i>

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>2 dokumen</i>	- Pengelolaan Website Kab. - Pengelola Video Converencing - Hosting Website Pemda - Pembangunan Ulang Website Kab.	<i>336.800.000</i>	<i>336.689.999</i>	<i>99,97</i>
	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	- Publikasi Stunting - Belanja modal alat studio, audio, video - Honorarium tenaga honorer bidang IKP	<i>263.723.100</i>	<i>263.635.000</i>	<i>99,97</i>
	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	<i>Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	<i>18 dokumen</i>	<i>20 dokumen</i>	- Kerjasama Media Publikasi	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>100,00</i>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	- Belanja modal Acces point - Belanja modal peralatan jaringan - Jasa teknisi jaringan instalasi	<i>143.060.000</i>	<i>143.000.000</i>	<i>99,96</i>

	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>- Grand design; Arsitektur SPBE</i>	<i>200.000.000</i>	<i>199.420.000</i>	<i>99,71</i>
	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i>	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	<i>1 layanan</i>	<i>1 layanan</i>	<i>;- Sosialisasi penerapan SPBE</i>	<i>14.020.000</i>	<i>14.020.000</i>	<i>100,00</i>
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>- Pembuatan buku profil daerah - Perjalanan dinas koordinasi/konsultasi</i>	<i>42.509.370</i>	<i>31.715.370</i>	<i>74,61</i>
	<i>Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	<i>Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	<i>Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	<i>34 orang</i>	<i>40 orang</i>	<i>- Bimtek penyusunan buku profil OPD - Perjalanan dinas</i>	<i>51.108.000</i>	<i>50.638.000</i>	<i>99,08</i>

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>- Sosialisasi penerapan TTE lingkup pemda - Perjalanan dinas</i>	<i>65.948.300</i>	<i>64.452.500</i>	<i>97,73</i>
JUMLAH							4.855.277.774	4.773.281.508	98,31

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pemerintah Negara Indonesia yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
3. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

Mewujudkan birokrasi pemerintahan provinsi yang moderen, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village govenance) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemeritahan.

Misi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu :

1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman dan prasarana wilayah
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wawonii
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi Daerah
4. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan public
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Dari telaahan misi di atas memberi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kab. Konawe Kepulauan dalam menetapkan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Renstra.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sesuai dengan misi satu (1) Bupati konawe Kepulauan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah” yang kemudian diturunkan lagi dalam sasaran satu (1) “Meningkatnya kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah” maka Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian menetapkan tujuan :

“Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana wilayah”

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai oleh dinas Komunikasi Informasi, dan Persandian dalam kurun waktu lima tahun ke depan. adapun sasarannya adalah :

TUJUAN DAN SASARAN KINERJA OPD (RENSTRA 2021-2026)			
TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Indeks Konektifitas	1. Meningkatnya konektivitas wilayah melalui jaringan telekomunikasi	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan komunikasi
		2. Meningkatnya data statistik yang terintegrasi	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral
		3. Meningkatnya penggunaan persandian oleh perangkat daerah	Indeks kematangan keamanan Informasi perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan 3 Urusan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang diaplikasikan dalam 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi

Tabel 5
Target Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam RPJMD 2021-2026

URUSAN	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RPJMD 2021-2026					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	100	100	100	100	100	100
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan media massa yang mempromosikan pembangunan daerah	50	55	60	65	70	80

	Program pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan wilayah dan/atau OPD yang sudah terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan telekomunikasi	70	80	85	90	95	100
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Cakupan perangkat daerah yang memiliki profil OPD	0	50	75	100	100	100
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi perangkat daerah	0	25	50	100	100	100

Tabel 6
Target Kinerja Diskominfo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui jaringan telekomunikasi	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan media komunikasi dan informatika melalui jaringan komunikasi	90%	95%	100%
2.	Meningkatnya data statistik yang terintegrasi	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	75%	100%	100%
3.	Meningkatnya penggunaan persandian oleh perangkat daerah	Indeks kematangan keamanan informasi perangkat Daerah	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan rencana tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan masih menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program.

Selain memperhatikan target program dan kegiatan yang terdapat dalam renstra diskominfo 2021-2026, penyesuaian target dan indikator dalam sub kegiatan juga semestinya memperhatikan Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Akibat adanya pemutakhiran sub kegiatan pada kepmen terbaru, maka beberapa sub kegiatan yang terdapat dalam renstra tidak lagi dapat diinput kedalam rencana kerja tahun 2025, sehingga beberapa sub kegiatan yang diinput tidak lagi sesuai dengan indikator didalam rensta OPD namun untuk sub kegiatan yang ditetapkan masih sejalan dengan capaian kinerja Dinas Kominfo dan Persandian. Selain itu, Pagu inputan juga telah ditetapkan dan menjadi dasar dalam penginputan renja di aplikasi SIPD nantinya.

Tabel 7
Rumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Program dan Kegiatan KOMINFO Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan	INDIKATOR	Target Indikator	Rincian Kegiatan	Pagu Rencana T.A. 2025	Prakiraan maju tahun 2026
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.16.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 dokumen	- Penyusunan dokumen renja/renstra - Perjalanan dinas Rapat dan Konsultasi	34.180.000	40.000.000
2.16.01.2.01.0002	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 dokumen	- ATK	2.745.000	10.000.000
2.16.01.2.01.0004	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 dokumen	- Rapat, Koordinasi, Konsultasi Penyusunan dokumen DPA	28.520.000	31.372.000
2.16.01.2.01.0006	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 laporan	- Penyusunan LPPD	11.500.000	14.400.000
2.16.01.2.01.0007	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 laporan	- Penyusunan LAKIP	11.860.000	14.400.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2.16.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	10 orang / bulan	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Honorarium penatausahaan keuangan	905.438.805	950.950.500

2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.500.000	6.500.000
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	- Penyusunan laporan bulanan dan semesteran	6.500.000	13.000.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	- Dokumen usulan SSH	3.500.000	3.500.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	- Penyediaan pakaian batik khas konkep - Penyediaan pakaian khaki - Penyediaan pakaian PDH - Penyediaan pakaian olahraga SKPD	40.000.000	36.600.000
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	- Pelaksanaan bimtek ASN	67.712.000	70.000.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	- Pemeliharaan/penyediaan komponen listrik kantor	1.000.000	1.500.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	- Penyediaan aksesoris perlengkapan kantor	10.000.000	10.000.000
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket			2.000.000

2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	- Penyediaan ATK/Barang pakai habis	26.000.000	30.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	- Langganan Media Cetak - Cetak dokumen peraturan perundang-undangan	5.040.000	5.500.000
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	- Rapat Kantor	15.750.000	17.750.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	- Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	335.000.000	380.000.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	- Pengadaan motor ASN	50.000.000	50.000.000
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	- Pengadaan lemari/kursi/meja kantor	2.000.000	20.000.000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang disediakan	1 unit	- Pengadaan Printer	5.000.000	30.000.000
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		0	300.000.000
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		0	70.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	- Penyediaan materai kantor	3.500.000	3.500.000

2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	- Langganan Listrik Kantor	10.000.000	11.000.000
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			500.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	- Honorarium tenaga honorer/PHL	36.000.000	50.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	- Pembayaran pajak kendaraan dinas - Pemeliharaan kendaraan dinas	75.000.000	95.000.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		-	5.000.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	- Pemeliharaan gedung kantor	7.150.000	10.000.000
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		-	2.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 laporan	- Kerjasama mitra media diskominfo	450.000.000	1.000.000.000

2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 komunitas	- Pembentukan KIM Konkep	100.000.000	100.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 permohonan	- Pengelolaan SPAN LAPOR	30.000.000	50.000.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 %	- Publikasi cegah stunting melalui pemasangan baliho/spanduk	30.000.000	50.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 media	- Honorarium Pengelola Web dan medsos kab dan diskominfo - Publikasi cegah stunting melalui media komunikasi diskominfo	100.000.000	200.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	100 konten	- Pembuatan Konten Web dan medsos konkep	200.000.000	200.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	- Hosting nama domain dan sub domain	20.000.000	50.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.16.03.2.01.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 dokumen	- koordinasi terkait dokumen proses bisnis	2.500.000	2.750.000

2.16.03.2.01.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	- Fasilitasi penyelenggaraan SPBE	20.000.000	50.000.000
2.16.03.2.01.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 dokumen	- Koordinasi terkait 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	20.000.000	150.000.000
2.16.03.2.01.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Apk	- Koordinasi terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10.000.000	50.000.000
2.16.03.2.01.0024	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 PD	- Belanja Bandwidht - Belanja Layanan Sewa Jaringan FO kab. - Izin siaran radio HT - Jasa teknisi jaringan instalasi	1.115.000.000	2.000.000.000
2.16.03.2.01.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 PD	;- Penyediaan akses point yang berkualitas	50.000.000	55.000.000

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
2.20.02.2.01.0007	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	34 orang	- Pelatihan/Workshop statistik sektoral	100.000.000	150.000.000
2.20.02.2.01.0009	<i>Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral</i>	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	50 %	- Pembuatan buku profil daerah - Kompilasi data statistik OPD	50.000.000	50.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
2.21.02.2.01.0001	<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>	1 dokumen	Koordinasi dan Pembuatan Perbub terkait Tata kelola keamanan informasi dan Pola Jaring Komunikasi Sandi	70.000.000	100.000.000
2.21.02.2.01.0002	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	Koordinasi terkait Pengelolaan SDKI pemda, Laporan Indeks IKKI	10.000.000	50.000.000
JUMLAH					4.127.395.805	6.602.222.500

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 dalam tujuan penyelenggaraan pembangunan di Bidang Komunikasi, Teknologi Informatika, persandian dan statistik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

Keberhasilan Program Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Kepulauan tidak hanya ditentukan oleh dukungan dari perangkat SKPD KOMINFO itu sendiri melainkan juga dengan dukungan dari Pemerintah Daerah terutama terkait penambahan alokasi anggaran terutama dalam mewujudkan konektivitas internet antar OPD dan wilayah kecamatan serta mewujudkan data statistik yang terintegrasi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 maka mempermudah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025.